

DEMOKRATISASI DI TIMOR TIMUR
(Pemilihan Umum Pertama Menuju Kemerdekaan Penuh)

SKRIPSI

Diajukan guna memenuhi salah satu syarat
untuk memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu
Program Studi Ilmu Hubungan Internasional
Pada
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Jember

Media Perolehan	08 FEB 2004	Klass 324.613.01
Tarima di: No. Induk:		IND d e,
Penyedia:		

Oleh :

Evi Indriana
NIM: 990910101052

Pembimbing :
Drs.H. Nuruddin M.Yasin
NIP: 130 518 486

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS JEMBER
2003

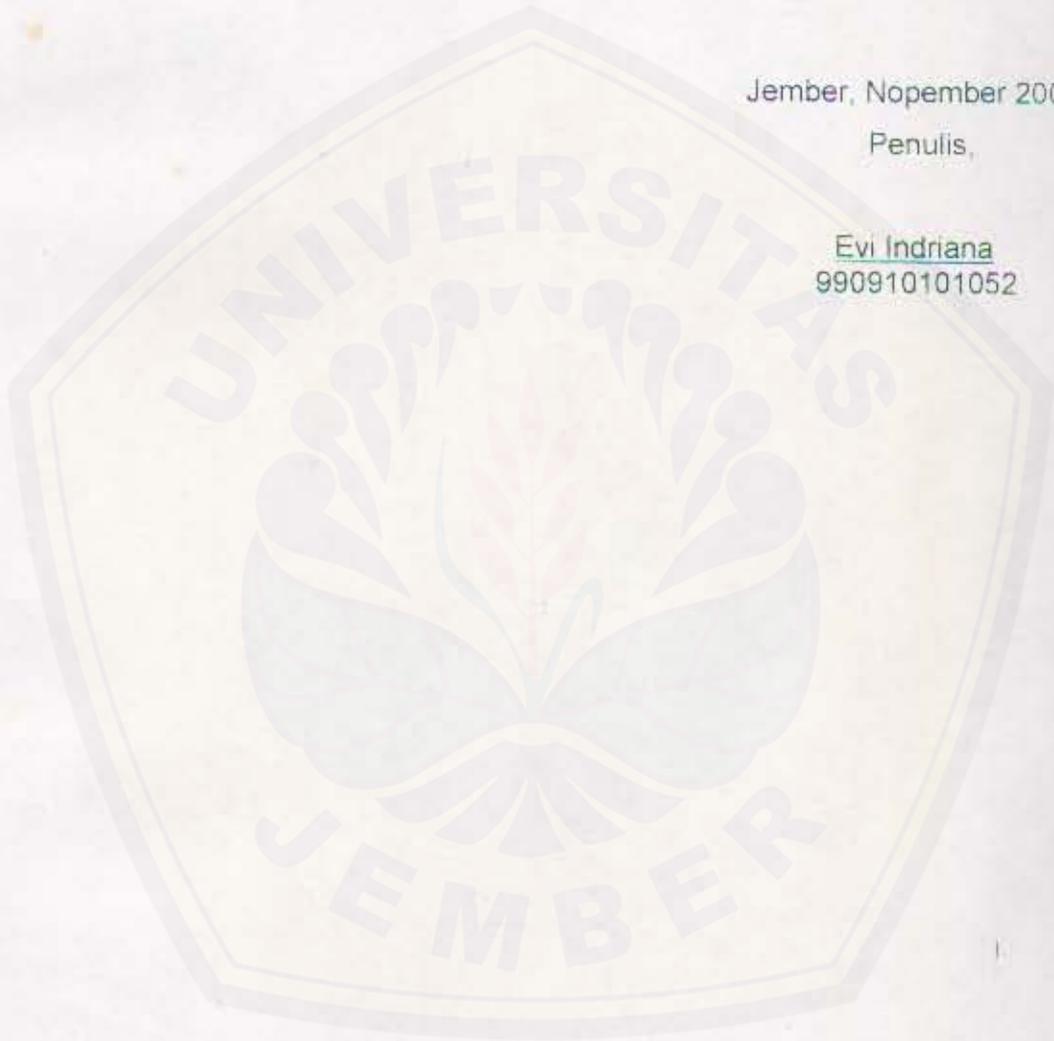
HALAMAN PERNYATAAN

Saya menyatakan bahwa skripsi ini adalah hasil karya asli saya dan semua bahan yang digunakan berasal dari sumber yang sah dan diketahui.

Jember, Nopember 2003

Penulis,

Evi Indriana
990910101052



PENGESAHAN

Diterima dan dipertahankan di depan panitia penguji skripsi guna memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana Strata Satu (S1) jurusan Ilmu Hubungan Internasional Program Studi Ilmu Hubungan Internasional pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember

Pada hari, Kamis

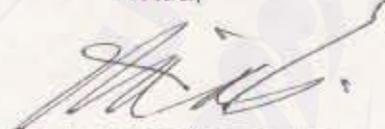
Tanggal: 6 Nopember 2003

Jam: 09.00 WIB

Panitia Penguji

Ketua,

Sekretaris


Drs. H. Umaid Radi, MA

Nip. 130 239 058


Drs. H. Nuruddin M. Yasin

Nip. 130 518 486

Susunan Anggota Panitia Penguji

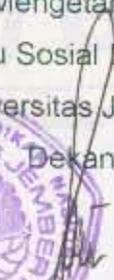
1. Drs. H. Umaid Radi, MA
2. Drs. H. Nuruddin M. Yasin
3. Drs. Supriyadi, MSi
4. Agus Tri Hartono, S. Sos



Mengetahui:

Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik
Universitas Jember

Dekan


Drs. H. Moch. Toerki

Nip.130 524 832



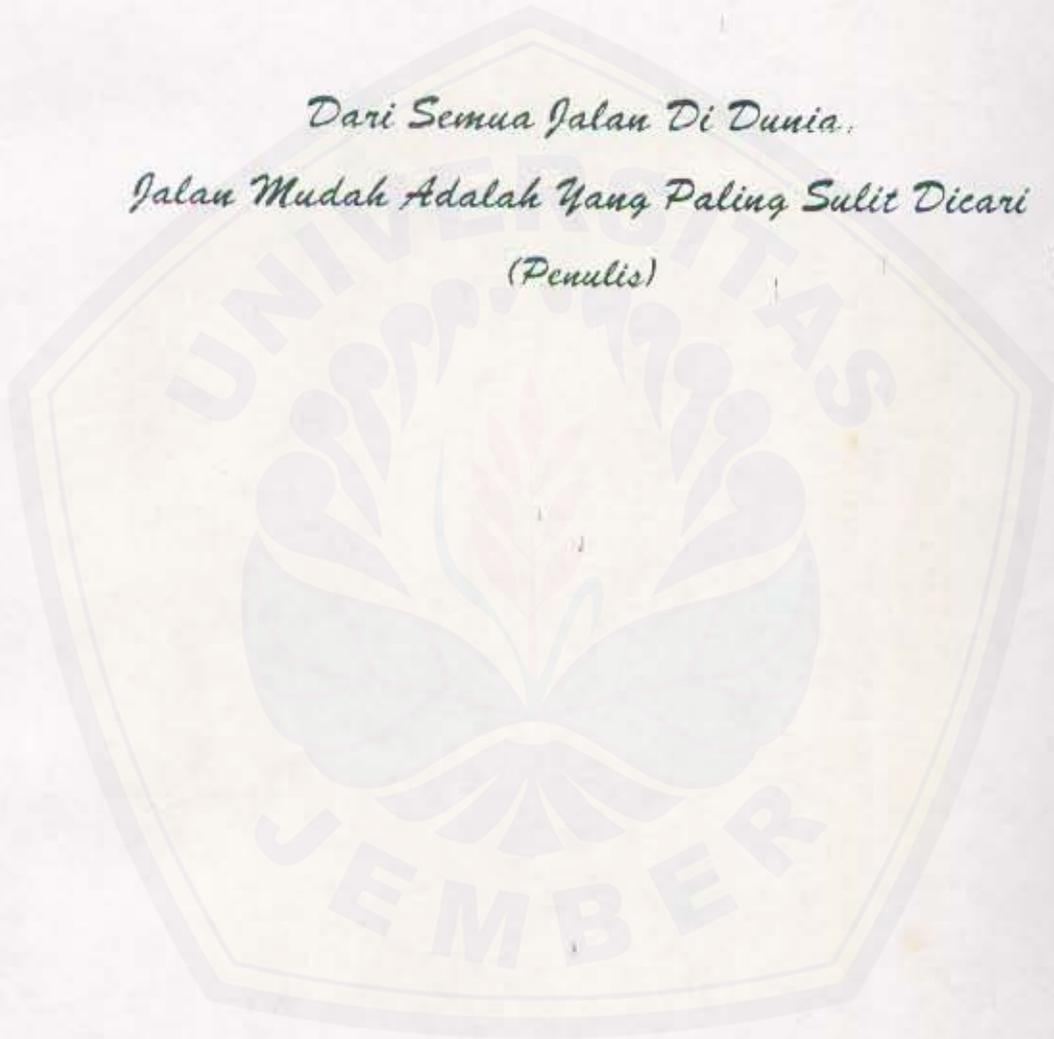
HALAMAN PERSEMBAHAN

Karya kecil ini kusembahkan untuk:

*Totok Endro Suwanto dan Suparti, Ayah Bunda tercinta
Mbak Indah dan Dek Risa, aku bangga menjadi bagian dari kita
Guru-guruku yang banyak memberi andil dalam hidupku
Hubungan Internasional, tempat aku menimba ilmu*

HALAMAN MOTTO

*Dari Semua Jalan Di Dunia,
Jalan Mudah Adalah Yang Paling Sulit Dicari
(Penulis)*



KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji dan syukur kehadiran Allah SWT, yang hanya dengan berkat dan rahmat-Nyalah maka penulisan skripsi ini dapat terselesaikan.

Penulisan skripsi ini dimaksudkan untuk memenuhi syarat dan sudah menjadi tugas wajib untuk memperoleh gelar kesarjanaan pada Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Jember.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini, dari awal hingga akhir, penulis banyak mendapatkan bantuan, bimbingan, dan dorongan dari berbagai pihak. Maka sudah sewajarnya jika pada kesempatan ini penulis dengan ketulusan hati menyampaikan rasa terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan, bimbingan, serta dorongan tersebut hingga terselesaikannya skripsi ini, khususnya kepada:

1. Bapak Drs. H. Nuruddin M. Yasin, selaku dosen pembimbing skripsi sekaligus Ketua Jurusan Hubungan Internasional.
2. Bapak Drs. Abubakar Eby Hara, MA, PhD, selaku dosen wali penulis.
3. Tim penguji skripsi, Bapak Drs. Umaid Radi, MA, Bapak Drs. Supriyadi, Msi, dan Bapak Agus Tri Hartono, S. Sos, terima kasih atas masukannya.
4. Bapak Drs. H.M Toerki, selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Jember.
5. Segenap dosen dan karyawan FISIP Universitas Jember.
6. Pimpinan dan staf perpustakaan pusat dan perpustakaan FISIP Universitas Jember.
7. Mas Giarto dan Si kecil Anggi, senang selalu ditemani oleh kalian.
8. Keluarga besar penulis, eyang putri, eyang kakung, mbak ana, mas Toni, De Har, De Yon, Lek Tin, Lek Nani, Lek Dah dan semua keluarga di Lumajang.

9. Teman-teman HI 99, Hendrik, Ira, Vivin, Putri, Iwan, Futi, Farida, Octa, Wahyu (cowok) dan yang lainnya, we are the best generation, 'ok.
10. Ichum 98, thanks for win-win solutionnya.
11. Anak-anak janem 19, Mbak Ni'a, Mbak Ida, May, Puspa, Yuli, Catur, Ririen, Titi, Sevi, Maria, Ninik, Yeni, Rita dan semuanya, senang menjadi komunitas kalian.
12. Semua pihak yang belum penulis sebutkan, terima kasih banyak.

Besar harapan penulis bahwa skripsi ini dapat bermanfaat bagi siapa saja yang membacanya, agama dan bangsa, serta menjadi persembahan untuk almamater tercinta. Amin.

Jember, Nopember 2003

Penulis.

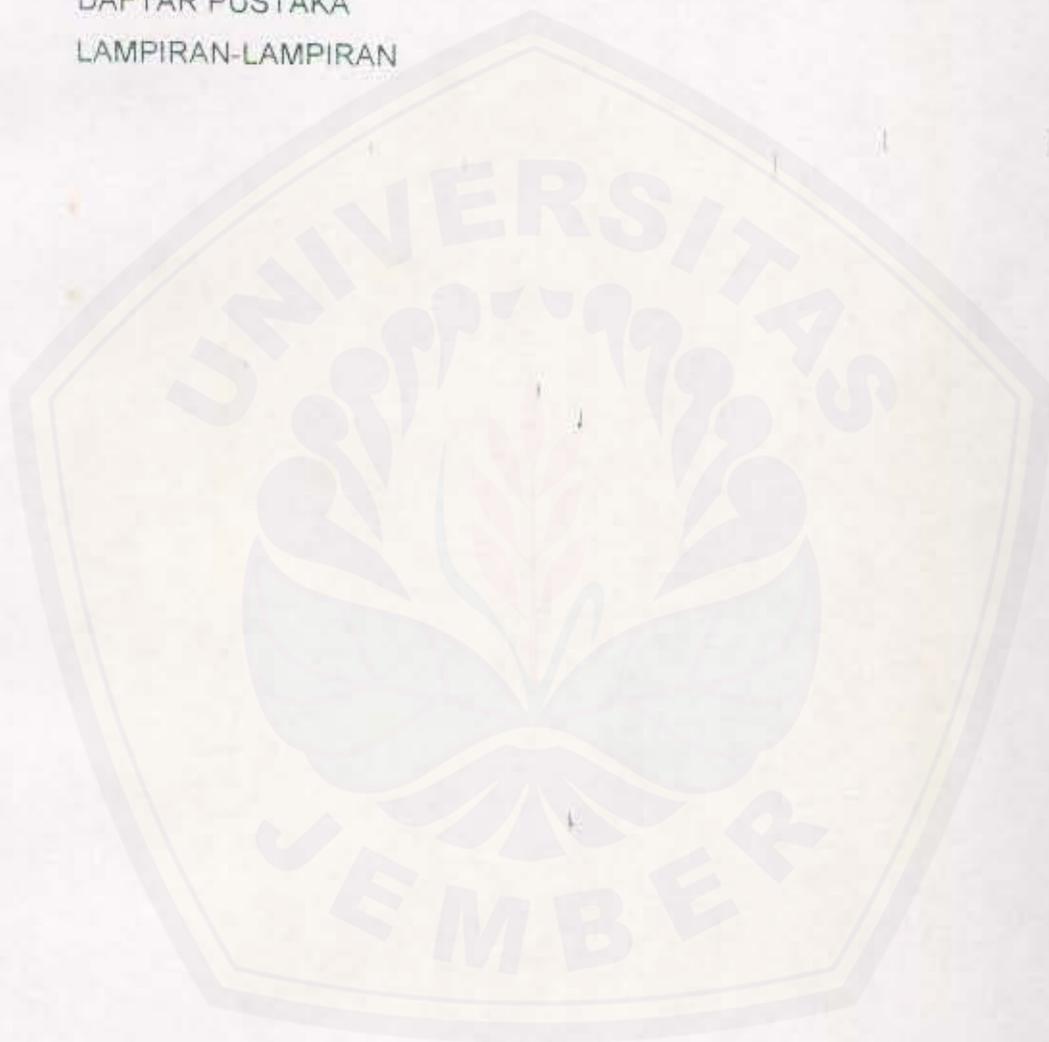


DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERNYATAAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN	iv
HALAMAN MOTTO	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI	viii
DAFTAR LAMPIRAN	xi
BAB I. PENDAHULUAN	1
1.1. Alasan Pemilihan Judul	1
1.2. Ruang Lingkup Pembahasan	4
1.2.1. Batasan Waktu	4
1.2.2. Batasan Materi	5
1.3. Problematika	5
1.4. Kerangka Dasar Pemikiran	6
1.5. Hipotesa	15
1.6. Metode Penelitian	16
1.6.1. Metode Pengumpulan Data	16
1.6.2. Metode Analisis Data	17
1.7. Pendekatan	17
BAB II. GAMBARAN UMUM DAN SEJARAH POLITIK DI TIMOR TIMUR	19
2.1. Timor Timur Sebuah Pengantar	19
2.1.1. Kondisi Geografis	19
2.1.2. Kondisi Penduduk, Ekonomi, dan Budnya	20
2.2. Sejarah Politik di Timor Timur	21
2.2.1. Masa Kolonialisme Portugis	21

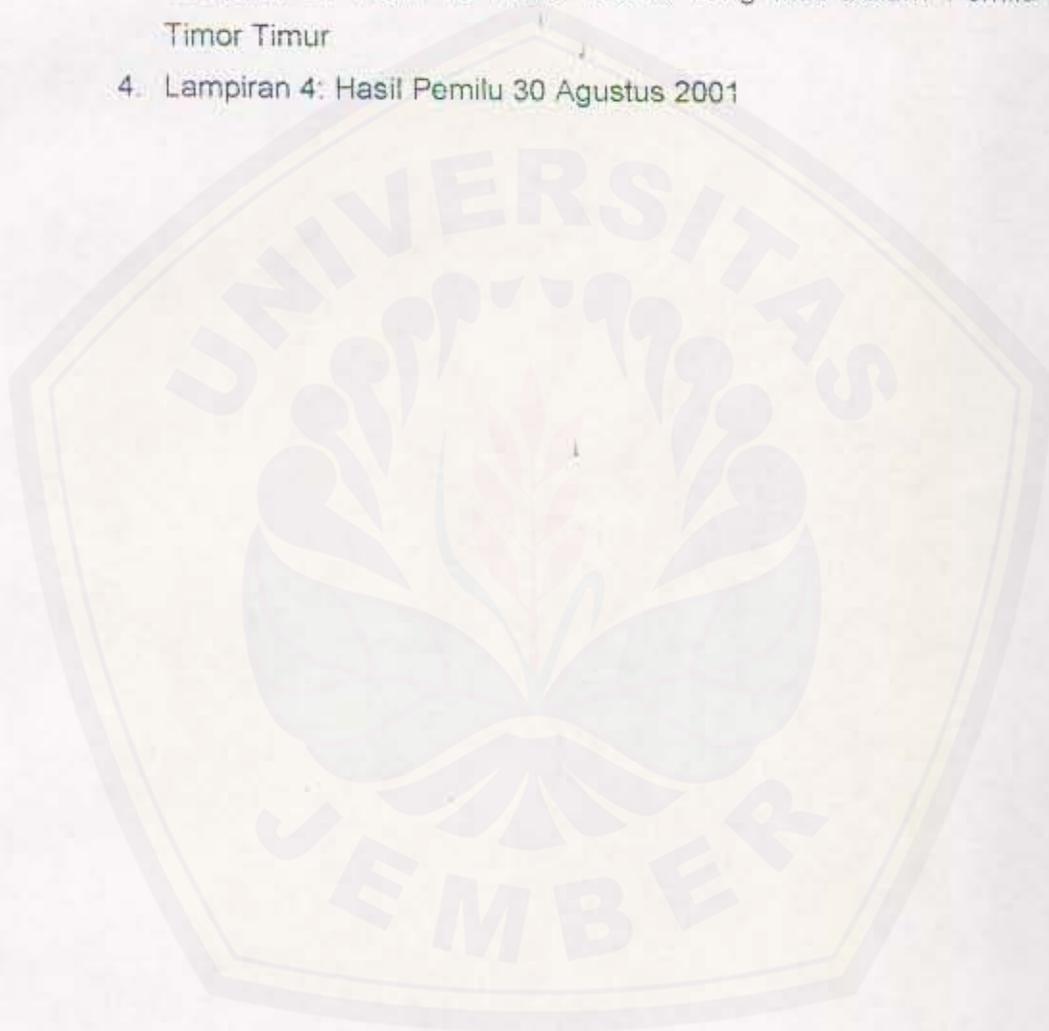
a.	Masuknya Portugis dan Pemberontakan di Timor Timur	21
b.	Masa Pemerintahan Portugis di Timor Timur ..	23
c.	Dekolonisasi dan Demokrasi	25
d.	Pertikaian antar Partai Politik dan Implikasinya	28
2.2.2.	Dibawah Rezim Militer Indonesia.....	30
a.	Invasi dan Intervensi Militer oleh Indonesia .	30
b.	Timor Timur Sebagai Propinsi ke-27 Indonesia	32
c.	Kebijakan Baru Pemerintahan Habibie	35
BAB III.	DINAMIKA POLITIK MENJELANG PEMILIHAN UMUM PERTAMA DI TIMOR TIMUR	39
3.1.	Kelompok-kelompok Yang Berperan Penting Dalam Proses Transisi Politik Di Timor Timur	39
3.2.	Tuntutan Demokratisasi bagi Timor Timur	41
3.3.	Proses Timorisasi di Timor Timur	44
3.4.	Dinamika Politik Dalam Parlemen Sementara di Timor Timur.....	45
BAB IV.	PROSES DEMOKRATISASI DI TIMOR TIMUR	50
4.1.	Pemilu Sebagai Mekanisme Demokrasi	50
4.2.	Pemilu Dewan Konstituante	51
4.2.1.	Tujuan Pemilu Dewan Konstituante	51
4.2.2.	Kampanye Politik dan Persaingan antar Partai Politik	52
4.2.3.	Pelaksanaan Pemilu yang Aman dan Demokratis	56
4.2.4.	Kemenangan Fretilin	60

4.3. Pemilu Presiden	64
4.3.1. Prosesi Pemilihan Umum Presiden	64
4.3.2. Kemenangan Xanana Gusmao	71
BAB V. KESIMPULAN	73
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN-LAMPIRAN	



DAFTAR LAMPIRAN

1. Lampiran 1: Peta Republik Demokratik Timor Leste
2. Lampiran 2: Resolusi DK PBB No. 1272 Tahun 1999
3. Lampiran 3: Profil 16 Partai Politik Yang Ikut Dalam Pemilu Di Timor Timur
4. Lampiran 4: Hasil Pemilu 30 Agustus 2001



BAB 1 PENDAHULUAN

1.1 Alasan Pemilihan Judul

Demokrasi merupakan suatu tuntutan yang universal bagi hampir semua negara di dunia. Dalam pelaksanaan demokrasi, masing-masing negara memiliki corak dan variasi sendiri-sendiri. Meskipun demikian, secara umum tatanan pemerintahan yang demokratis mempunyai ciri –salah satunya – pelaksanaan pemilu yang jujur, bebas dan adil. Disebutkan juga oleh Calderon bahwa isi demokrasi diidentifikasi dalam tiga prinsip yaitu penghormatan atas hak asasi manusia; penegasan bahwa pemilihan umum yang bebas dan teratur; dan karakter publik dari semua aktifitas pemerintahan, sebagaimana juga tanggung jawab semua agen pemerintahan. Selain itu juga diidentifikasi dengan keabsahan sejumlah institusi dan organisasi tertentu.¹ Dalam definisi tersebut, pemilu menjadi prasarat bagi sebuah demokrasi walaupun pemilu bukanlah makna keseluruhan dari partisipasi demokratis. Dengan adanya pemilu, rakyat menjadi penentu jalannya pemerintahan dengan berpartisipasi aktif dalam pemilu. Calon pemimpin dapat bersaing dalam memperebutkan suara rakyat sehingga diharapkan pemimpin yang akan muncul dan memenangkan pemilu mendapatkan dukungan dan legitimasi dari rakyatnya.

Tujuan pemilu ditingkat nasional ada dua. Yang pertama adalah untuk memilih kepala pemerintahan atau kepala eksekutif dan untuk menggolkan kebijakan umum yang akan dilaksanakan oleh pemerintah terpilih. Dan yang kedua adalah untuk memilih anggota-anggota lembaga perwakilan, legislatif atau parlemen yang akan menetapkan peraturan

¹ Lihat Ricardo Arias Calderon dalam sebuah catatan terdapat dalam Guillermo O'Donell (ed), 1993, *Transisi Menuju Demokrasi: rangkaian kemungkinan dan ketidakpastian*. Jakarta, LP3ES, halaman 70-71

perundang-undangan dan ketentuan-ketentuan lain serta mengawasi kegiatan pemerintah demi kepentingan rakyat.²

Bagi masyarakat Timor Timur yang sedang mempersiapkan kemerdekaannya, pemilihan umum dewan konstituante yang dilaksanakan pada tanggal 30 Agustus 2001 kemudian diikuti dengan pemilihan umum presiden 7 bulan berikutnya yaitu pada tanggal 14 April 2002, merupakan peristiwa besar yang memiliki makna historis tersendiri dalam perjalanannya menuju kehidupan berbangsa dan bernegara selanjutnya. Pada tanggal 30 Agustus 2001 seluruh rakyat Timor Timur mengadakan pemilihan umum untuk memilih dewan konstitusi yang akan mengisi 88 kursi parlemen. Dewan konstitusi ini dalam waktu 90 hari akan menulis konstitusi pertama bagi parlemen pertama di Timor Timur. Selanjutnya tanggal 14 April 2002, pemilihan umum adalah untuk memilih presiden pertama. Pemilihan ini merupakan perintang terakhir bagi Timor-timur untuk menjadi negara yang benar-benar merdeka. Setelah dewan parlemen terbentuk dan presiden pertama terpilih, Timor Timur tinggal menunggu waktu yang tepat bagi proklamasi kemerdekaannya. Pemilihan umum ini juga memiliki makna yang strategis karena merupakan upaya dan proses penting menuju tatanan sistem pemerintahan yang demokratis.

Pemilihan umum yang pertama kali berlangsung setelah lepas dari Indonesia itu juga sebagai tantangan besar yang harus dihadapi warga Timor Timur. Bagaimanapun proses demokrasi tidak pernah mudah dan prosesnya selalu mengandung resiko kegagalan.³ Hal ini sekaligus menjadi kekhawatiran bagi warga Timor Timur dan juga komunitas internasional. Kekhawatiran tersebut paling tidak memiliki alasan, pertama, selama ratusan tahun orang-orang Timor Timur tidak pernah bisa melaksanakan pemerintahan atau melakukan kontrol terhadap

² David Beetham & Kevin Boyle, 2000, *Demokrasi: 80 Tanya jawab*, Yogyakarta, KANISIUS, halaman 63

³ Guillermo O'Donnell (ed), 1993, *op cit.*, halaman 57

urusan dalam negerinya sendiri secara demokratis. Kedua, orang-orang Timor Timur masih takut pada setiap bentuk pemilihan, karena dimasa lalu pemilihan umum sering menyebabkan kekerasan. Kekerasan pernah terjadi diantara partai politik yang bersaing dalam pembentukan koloni Portugis sebelum invasi oleh Indonesia pada tahun 1975. Frustrasi juga membayangi masyarakat Timor Timur karena pemilihan umum pertama ini menandai dua tahun jajak pendapat publik yang terjadi pada tanggal yang sama tahun 1999 yang lalu. Dimana peristiwa itu diakhiri dengan kekerasan, pegrusakan dan pembunuhan secara besar-besaran oleh pihak yang kalah dalam pemilihan. Tetapi kekhawatiran itu justru menjadi kegembiraan ketika pemilihan umum itu berlangsung dengan aman dan dalam situasi yang demokratis, yang ditandai dengan tidak adanya insiden-insiden yang berarti. Hal ini dirasakan oleh rakyat karena pemilihan umum itu benar-benar didasarkan pada kehendak dan keinginan masing-masing. Dalam arti forum pemilu kali ini benar-benar membuat rakyat Timor Timur berhak secara bebas menentukan pilihannya.

Dengan adanya pemilihan umum tanggal 30 Agustus 2001 dan 14 April 2002 tersebut, diharapkan rakyat Timor Timur mendapatkan tempat dan perannya didalam pemerintahan. Dan tentu saja untuk Timor Timur kelak yang sudah merdeka.

Dari gambaran diatas, maka pemilihan umum pertama sebagai tahap akhir menuju kemerdekaan penuh di Timor Timur, merupakan sebuah kasus menarik yang penting untuk dikaji lebih jauh. Minimal ada beberapa alasan: 1) Timor Timur merupakan negara paling baru abad ini; 2) Pemilihan umum yang demokratis merupakan hal baru bagi rakyat Timor Timur yang merdeka, hal ini karena pengalaman bangsa ini selama ratusan tahun; 3) Diakui atau tidak, prosesi yang dilalui selama masa transisi sampai terlaksananya pemilihan umum untuk memilih anggota parlemen dan presiden berjalan relatif lancar dan demokratis sesuai

dengan rencana. Dan hal ini tentu saja bertentangan dengan bentuk-bentuk pemilihan yang pernah terjadi sebelumnya.

Berdasarkan fenomena tersebut diatas, penulis tertarik untuk mengangkat masalah tersebut diatas kedalam sebuah karya tulis dengan judul:

DEMOKRATISASI DI TIMOR TIMUR
(Pemilihan Umum Pertama Menuju Kemerdekaan Penuh)

1.2 Ruang Lingkup Pembahasan

Dalam penulisan karya ilmiah, sangat diperlukan ruang lingkup pembahasan. Tujuannya agar pembahasan masalah berkembang kearah sasaran yang tepat dan tidak keluar dari kerangka permasalahan yang ditentukan.

Untuk mempermudah pembahasan, penulis membedakan pembatasan ruang lingkup kedalam dua **batasan** yang meliputi batasan waktu dan **batasan materi**.

1.2.1 Batasan Waktu

Batasan waktu adalah rentang waktu (durasi) terjadinya sebuah peristiwa atau objek yang dianalisis. Sesuai dengan judul yang penulis ajukan diatas, maka yang menjadi sorotan penting adalah masa transisi Timor Timur menuju kemerdekaan penuh. Setelah melakukan jajak pendapat publik yang mengakhiri wilayah ini dari propinsi ke-27 Indonesia menjadi wilayah yang bebas. Tetapi penulis memfokuskan bahasan pada rentang waktu terjadi pemilu sebagai fase akhir masa transisi. Rentang waktu itu terjadi baik pemilu parlemen pada 30 Agustus 2001 sampai pemilu presiden 14 April 2002, dimana masa itu merupakan masa paling penting bagi demokratisasi di Timor Timur.

1.2.2 Batasan Materi

Batasan materi berfungsi untuk menunjukkan ruang pembahasan sebuah peristiwa atau objek yang dianalisis, yaitu cakupan kawasan atau daerah studinya. Dalam membatasi objek atau pokok persoalan, Sutrisno Hadi mengatakan bahwa;

"Sekali suatu pokok persoalan telah ditetapkan, maka langkah berikutnya adalah membatasi luasnya dan memberikan formulasi-formulasi yang tegas terhadap pokok persoalan itu. Bagi penyelidik sendiri, penegasan batas-batas ini akan menjadi pedoman kerja, dan bagi orang lain kepada siapa laporan *research* itu hendak disajikan atau diserahkan, penegasan selalu berfungsi mencegah kemungkinan timbulnya kerincuan pengertian dan kekaburan wilayah persoalannya."⁴

Dari segi materi, penulis menitikberatkan pembahasan pada proses-proses yang dilalui pada masa transisi menuju kemerdekaan penuh guna menuju tatanan sistem pemerintahan yang demokratis. Penulis menekankan pada proses pemilu sebagai tahap akhir penting dalam proses peralihan kekuasaan menuju kemerdekaan penuh. Bagaimana pemilu pertama itu berlangsung.

1.3 Problematika

Pada hakekatnya, masalah adalah jiwa penelitian. Setiap penelitian atau analisis terhadap suatu objek atau peristiwa, pada titik tertentu akan terbentur pada permasalahan yang menuntut jawaban. Dengan diketemukannya permasalahan, maka penulis dapat melakukan penelitian yang terarah serta mendorong peneliti untuk berfikir demi mendapatkan pemecahannya, the Liang Gie mengemukakan pengertian masalah sebagai berikut:

"Masalah ialah kejadian atau keadaan yang menimbulkan pertanyaan dalam hati kita tentang kedudukannya. Kita tidak puas dengan melihatnya saja, melainkan kita ingin mengetahuinya lebih

⁴ Sutrisno Hadi, 1997, *Metodologi Research*, Yogyakarta, Andi Offset, halaman 8

mendalam. Masalah yang berhubungan dengan ilmu-ilmu senantiasa mengajukan pertanyaan bagaimana dan apa sebabnya."⁵

Lebih jelasnya Suparmoko menjelaskan ciri-ciri masalah adalah sebagai berikut:

1. "Masalah penelitian harus mencerminkan kebutuhan yang dirasakan
2. Masalah penelitian bukanlah sebuah hipotesis tetapi sebuah fakta
3. Masalah penelitian dapat menyarankan adanya hipotesis sehingga harus dapat diuji
4. Masalah penelitian harus relevan dan dapat dikuasai."⁶

Pada dasarnya kedua definisi tersebut mempunyai penafsiran yang kira-kira sama yaitu bahwa problematika adalah sesuatu masalah yang perlu dipecahkan. Dalam kasus pemilihan umum di Timor Timur ini ada hal terpenting yang harus dicermati yaitu kenyataan bahwa pemilihan umum sebagai tahap akhir dari transisi menuju kemerdekaan penuh berjalan relatif lancar dan demokratis. Sehingga penulis mencoba memformulasikan permasalahan sebagai berikut:

Bagaimana proses demokratisasi di Timor Timur?

1.4 Kerangka Dasar Pemikiran

Berkaitan dengan pokok permasalahan diatas, untuk menjelaskan proses demokratisasi di Timor Timur, mengapa pemilihan umum pertama itu bisa berjalan dengan lancar dan demokratis, maka penulis menggunakan konsep **Demokrasi dan Demokratisasi**.

Mohtar Mas'ood dan Plano masing-masing memberikan batasan tentang definisi konsep sebagai berikut:

"Konsep sebenarnya adalah sebuah kata yang melambangkan sesuatu gagasan. Ia bukan sesuatu yang asing, kita menggunakannya sehari-hari untuk menyederhanakan kenyataan yang kompleks

⁵ The Liang Gie, 1882, *Ilmu Politik*, Yogyakarta, Gajah Mada University Press, halaman 49

⁶ Suparmoko, 1991, *Metode Penelitian Praktis*, Yogyakarta, Badan Penerbit Fakultas Ekonomi UGM, halaman 12

dengan mengkategorikan hal-hal yang kita temui berdasar ciri-cirinya yang relevan bagi kita."⁷

"Konsep adalah suatu gambaran atau gagasan jiwa yang dibentuk atas dasar pengeneralisasian sifat-sifat kelompok benda. Konsep adalah suatu abstraksi yang melahirkan deskripsi. Oleh karena itu ia bisa diterapkan pada hal-hal khusus dari suatu penggolongan yang bersangkutan dengan konsep."⁸

Konsep dalam ilmu-ilmu sosial menunjuk pada sifat-sifat dari objek-objek yang dipelajarinya. Konsep akan membantu memilah-milah kenyataan yang berguna bagi kita. Oleh karena itu, konsep sangat penting dalam menentukan bentuk dan isi teori.

1. Konsep Demokrasi

Sistem politik bersifat demokratis sejauh para pembuat keputusan kolektif yang paling kuat dalam sistem itu dipilih melalui pemilihan umum yang adil, jujur dan berkala, dan didalam sistem itu para calon secara bebas bersaing untuk memperoleh suara dan hampir semua penduduk dewasa berhak memberikan suara. Sedangkan suatu sistem tidak demokratis apabila oposisi tidak diperbolehkan didalam pemilihan umum, atau oposisi itu dikontrol atau dihalang-halangi dalam mencapai apa yang dapat dilakukannya, serta dalam hasil pemungutan suara dalam pemilihan dimanipulasi atau perhitungannya tidak benar.⁹

Laporan Internasional dari National Democratic Institute for International Affairs di Senegal tahun 1991¹⁰ mengemukakan bahwa:

....demokrasi dapat didefinisikan dalam pengertian yang sangat formal: pemilu yang adil; pers bebas; dan banyak partai. Tetapi, untuk menegakkan sistem pluralistik memerlukan lebih banyak hal... Sebuah lingkungan harus diciptakan untuk memahami nilai-nilai

⁷ Mohtar Mas'od, 1994, *Ilmu Hubungan Internasional: Disiplin dan Metodologi*, Jakarta, LP3ES, halaman 94

⁸ Jack C. Plano (ed), 1982, *Kamus Analisa Politik*, Jakarta, Rajawali Perss, halaman 38

⁹ Samuel P. Huntington, 1997, *Gelombang Demokratisasi Ketiga*, Jakarta, Grafiti, halaman 4-6

¹⁰ Guy S. Goodwin-Gill, 1999, *Pemilu Jurdil: Pengalaman dan Standar Internasional*, Geneva, kerjasama Public Interest Research and Advocacy Centre (Pirac) dengan The Asia Foundation, halaman 62-63

demokrasi dan bertindak atas nama rakyat...Lingkungan semacam itu tidak tiba-tiba muncul. Lingkungan ini merupakan konsekuensi tindakan orang-orang yang memegang posisi kepemimpinan. Pemerintah dapat memainkan peran penting dalam merangsang aktivitas...melalui program kewarganegaraan yang tidak memihak yang menggalakkan nilai-nilai demokrasi diantara penduduk dewasa dan yang membentuk bagian sangat penting kurikulum pendidikan umum. Papol-parpol, organisasi sipil dan media mempunyai peran penting dalam hal ini.

Di Timor Timur, kemenangan partai Fretilin mengalahkan 15 partai politik lainnya serta kemenangan Xanana Gusmao sebagai presiden yang sebelumnya justru sebelumnya tidak bergabung dalam salah partai politik, merupakan pilihan rakyat. Dapat dimengerti bahwa kemenangan itu didasarkan pada kegigihan partai pemenang itu dalam memperjuangkan kemerdekaan, dan figur Xanana Gusmao sebagai pemersatu bagi rakyat Timor Timur. Kebebasan partai politik untuk memenangkan kursi parlemen kelihatannya terjamin. Walaupun terdapat sejumlah kerusuhan, tetapi kerusuhan itu hanya insiden kecil yang tidak mengganggu jalannya pemilihan. Partisipasi masyarakat dalam pemilihan juga sangat besar.

Saat ini walaupun kekuasaan rakyat baru diberikan sebatas pada hak memilih wakil-wakil partainya, namun nuansa sistem politik Timor Timur telah berubah kearah demokratisasi, baik dalam bentuk sistem maupun kebiasaan tingkah laku. Demokrasi bukan sesuatu yang bisa diperoleh dalam satu kali masa pemilu atau sepuluh atau dua puluh tahun, namun bahkan ratusan tahun dengan sekian ratus pemilihan umum. Perlu proses pembelajaran masyarakat dan perbaikan sistem secara terus menerus sehingga tercipta suatu kondisi keseimbangan antara perilaku politik dengan kelembagaan politik.¹¹

Pada akhir dasawarsa 1960, kriteria pemilihan yang bebas dan adil dari demokrasi itu menjadi semakin bermanfaat dengan semakin

¹¹ Dr. M. Arif Nasition, MA. Dkk, 2000, *Demokratisasi dan Problematika Otonomi Daerah*, Bandung: Mandar Maju, halaman 47

banyaknya pengamatan yang dilakukan oleh kelompok-kelompok internasional terhadap suatu pemilihan umum. Menjelang tahun 1990 telah mencapai momentum dimana pemilu pertama pada sebuah negeri yang sedang melakukan demokratisasi baru dapat diterima umum sebagai absah apabila pemilihan umum itu diamati oleh satu atau lebih tim pengamat internasional yang cukup kompeten dan tidak berpihak, dan para pengamat itu mengesahkan pemilihan umum itu sebagai memenuhi standard kejujuran dan keadilan yang minimal.¹² Di Timor-timur, pelaksanaan pemilihan umum dipantau oleh 2.192 pengamat dan 111 organisasi internasional.¹³ Besarnya angka ini menunjukkan besarnya perhatian masyarakat internasional dalam keberhasilan pemilihan umum tersebut.

Beberapa hal pokok tambahan perlu dikemukakan dalam mendefinisikan demokrasi dikemukakan oleh Huntington¹⁴ yaitu:

1. Definisi demokrasi berdasarkan pemilihan merupakan definisi minimal. Bagi sebagian orang, demokrasi memiliki atau seharusnya memiliki konotasi yang jauh lebih luas dan idealistis. Namun apabila hal itu dilakukan, semua masalah yang menyertai definisi-definisi demokrasi berdasarkan sumber atau tujuannya akan muncul sehingga norma-norma yang kabur tidak menghasilkan analisis yang bermanfaat.
2. Sejauh para pembuat keputusan kolektif yang paling kuat tidak dipilih melalui pemilihan, maka sistem itu tidak demokratis. Jadi para pemimpin politik yang dipilih oleh masyarakat haruslah menjalankan kekuasaan yang sesungguhnya, bukan sebagai kedok bagi sebuah kelompok yang tidak dipilih secara demokratis untuk menjalankan kekuasaan yang lebih besar.

¹² Huntington, 1997, *ibid.*, halaman 6-7

¹³ *Pemilu di Timor Timur Berlangsung Aman*, harian Kompas, 15 April 2002

¹⁴ Huntington, 1997, *Op.cit.*, halaman 8-11

3. Mengenai kerapuhan atau stabilitas dari suatu sistem politik yang demokratis, kita bisa memasukkan konsep stabilitas atau institusionalisasi. Stabilitas merupakan suatu dimensi utama dalam analisis terhadap sistem politik manapun. Sistem politik bisa lebih atau kurang demokratis dan lebih atau kurang stabil. Sistem-sistem yang sama-sama demokratis boleh jadi sangat berbeda dalam stabilitasnya.
4. Masalah tentang apakah demokrasi dan nondemokrasi akan diperlakukan sebagai sebuah variabel dikotomis atau variabel kontinu. Pendekatan kontinu telah mengembangkan tolok ukur demokrasi yang menggabungkan indikator keadilan dalam pemilihan, pembatasan terhadap partai politik, kebebasan pers dan kriteria lainnya.
5. Rezim-rezim nondemokratis tidak mengadakan kompetisi dalam pemilu dan tidak memiliki tingkat partisipasi pemberian suara yang luas.

Ada beberapa pengertian minimalis dari demokrasi yang diambil dari konsep demokrasi Schumpeter¹⁵, yaitu sebagai suatu sistem untuk mencapai keputusan-keputusan politik dalam mana perorangan mendapat kekuasaan menentukan melalui perjuangan kompetitif guna memperoleh suara rakyat. Para pakar politik memberi tekanan pada kompetisi memperoleh suara rakyat atau para pemilih dalam pemilu sebagai inti dari demokrasi. Pengertian demokrasi yang demikian itu adalah pengertian minimalis dan disebut **Demokrasi electoral** atau juga disebut **demokrasi formal**.

Pemaknaan demokrasi ala Schumpeterian yang minimalis tetapi bersifat empirik, deskriptif, dan prosedural itu menjadi dasar pendekatan empirik, yang kemudian mendominasi teorisasi demokrasi kontemporer. Robert A. Dahl menyatakan bahwa rakyat harus diberi

¹⁵ Joseph A. Schumpeter, *Capitalism, Socialism, and Democracy*, dalam Teori-teori Politik Dewasa Ini, 1996, Jakarta: Raja Grafindo Persada, halaman 9-10

kesempatan yang lebih besar baik dalam kontestasi publik maupun partisipasi.¹⁶ Kesempatan itu dapat tercapai bila ditopang oleh delapan jaminan kelembagaan: 1)kebebasanⁱ membentuk dan bergabung dalam organisasi; 2)kebebasan menyampaikan pendapat; 3)hak memilih dalam pemilu; 4)hak untuk menduduki jabatan publik; 5)hak para pemimpin untuk bersaing dan memperoleh dukungan dan suara rakyat; 6)tersedianya sumber-sumber informasi alternatif; 7)terselenggaranya pemilihan umum yang bebas dan jujur; dan 8)adanya lembaga-lembaga yang menjamin agar kebijakan publik tergantung pada suara pemilihan umum dan pada cara-cara penyampaian preferensi yang lain.¹⁷

Karya lain dari Larry Diamond, Juan Linz dan Lipset menyederhanakan delapan kriteria Dahlian menjadi tiga kriteria untuk menandai sistem politik yang demokratis, yaitu: 1)kompetisi yang sungguh-sungguh dan meluas diantara individu-individu dan kelompok organisasi untuk memperebutkan jabatan-jabatan pemerintahan yang punya kekuasaan efektif pada jangka waktu yang teratur dan tidak menggunakan daya paksa; 2)partisipasi politik yang melibatkan sebanyak mungkin warga negara dalam pemilihan pemimpin atau kebijakan lewat pemilihan umum yang diselenggarakan secara teratur dan adil, sehingga tidak satupun kelompok sosial (warga negara dewasa) tanpa kecuali; 3)tingkat kebebasan sipil dan politik, yaitu kebebasan berbicara, kebebasan pers, kebebasan untuk membentuk dan bergabung dalam organisasi, yang cukup untuk menjamin integritas kompetisi dan partisipasi politik.¹⁸

Jauh lebih luas dari demokrasi electoral adalah **Demokrasi liberal (demokrasi maksimalis atau demokrasi negara-negara**

¹⁶ Robert A. Dahl, *Polyarchy: Participation and opposition*, 1971, New haven: Yale University Press

¹⁷ *Ibid.*, halaman 2-3

¹⁸ Larry Diamond, Juan Linz dan Seymour Martin Lipset (eds), *Democracy in Developing Countries*, Vol.2 Africa (Boulder, Colorado: Lynne Rienner, 1989), halaman xvi

industrialis maju barat). Selain pemilihan umum yang teratur secara berkala dan *luber*, ia juga menghendaki:

1. Adanya *reserved domain* bagi militer atau kekuatan sosial politik lainnya yang tidak *accountable* kepada para pemilih (rakyat) baik secara langsung maupun tidak langsung.
2. Ia mempunyai pertanggungjawaban vertikal yakni dari pemegang kekuasaan kepada pemberi kekuasaan/rakyat (melalui pemilu yang *luber* dan *judil*) dan pertanggungjawabab horisontal, yaitu antara pemegang kekuasaan satu sama lainnya sehingga tercipta sistem *checks and balances* (misalnya antara legislatif dan eksekutif).
3. Ia memuat ketentuan-ketentuan tentang pluralisme civic (sipil) dan politik serta kebebasan perorangan dan kelompok.

Secara lebih lengkap ciri-ciri demokrasi liberal¹⁹ adalah:

1. Kekuasaan berada pada pejabat-pejabat yang dipilih
2. Kekuasaan eksekutif dibatasi oleh konstitusi dan bertanggung jawab kepada lembaga-lembaga lainnya
3. Hasil pemilu harus tidak direkayasa sebelumnya, pihak oposisi harus memperoleh kesempatan untuk menang serta ada kemungkinan pergantian partai yang memerintah, tidak ada ketentuan konstitusi yang mengebiri hak untuk membentuk partai dan ikut dalam pemilu
4. Kelompok kultural, etnik, agama dan minoritas tidak boleh dilarang untuk menyatakan kepentingan-kepentingannya dalam proses politik
5. Rakyat bebas membentuk atau menjadi berbagai macam kelompok dan gerakan yang otonom, selain melalui partai dan pemilu
6. Terdapat sumber-sumber alternatif informasi, termasuk media pers yang bebas

¹⁹ Larry Diamond, "Is The Third Wave Over?", *Journal of Democracy*, July 1996, halaman 23-24

7. Perorangan mempunyai kebebasan substansial mengenai kepercayaan, pendapat, berdiskusi, berbicara, publikasi, berdemonstrasi dan menyampaikan petisi
8. Semua warganegara adalah sama dalam Undang-undang, kebebasan ini dilindungi secara efektif oleh kehakiman yang bebas dan tidak berpihak serta keputusannya dihormati oleh semua kekuasaan lainnya
9. Melindungi warga negara dari penahanan yang tidak sah dan tidak beralasan, pengasingan, teror, penyiksaan dan campur tangan yang tidak semestinya dalam kehidupan pribadinya (privacy) tidak saja oleh negara melainkan juga oleh kekuatan-kekuatan terorganisir anti pemerintah.

Selain dua bentuk demokrasi diatas terdapat pula bentuk ketiga yaitu **Demokrasi Pseudo (gabungan)**. Dalam demokrasi ini secara legal masih diijinkan partai oposisi, tetapi persyaratan crucial tidak ada, yaitu peluang yang *fair* dalam kompetisi yang memungkinkan kalahnya partai yang berkuasa (memerintah)

Timor Timur sendiri masih dalam tahap awal menuju negara yang demokrasi, pemilihan umum yang terjadi di Timor Timur dengan melibatkan sebagian besar warga negara dan memberikan ruang partisipasi yang lebih besar, adalah pemilihan umum yang pertama kali terjadi. Maka untuk melihat dan menjelaskan demokrasi di wilayah ini paling sesuai adalah menggunakan pengertian yang minimalis.

4. konsep demokratisasi

Demokratisasi merupakan proses perubahan dari rezim nondemokratis menjadi demokratis. Dalam proses ini, rezim otoritarian yang membangun sistem politik yang hegemonik tertutup, yang tidak memberi ruang partisipasi memadai bagi warga negara dalam proses politik yang berlangsung, mulai bergeser kearah pembentukan sistem politik yang lebih terbuka, lebih demokratis. Tujuan akhir dari proses

menjadi demokratis ini adalah terbentuknya suatu tatanan kehidupan politik dimana:

1. Warga negara secara bebas dan berkala memilih orang-orang yang mereka nilai layak dipercaya untuk memerintah
2. Orang yang memerintah dapat dipercaya dalam bertanggung jawab langsung kepada orang yang diperintah
3. Ada mekanisme politik yang memungkinkan warga negara dapat mengontrol sejauh mana kepentingan mereka dapat dilaksanakan oleh mereka yang memerintah
4. Ada kesejajaran tawar-menawar politik antara warga negara dengan orang yang memerintah, sebagai jaminan terciptanya hubungan yang bersifat konsultatif.²⁰

Pada dasarnya demokratisasi berbeda dengan demokrasi. Seperti telah disebut sebelumnya, demokratisasi adalah jalan atau proses perubahan dari rezim non demokratis menjadi rezim demokratis. Jika mengikuti kajian Dahl, demokratisasi berarti proses perubahan rezim otoritarian (hegemoni tertutup) yang tidak memberi kesempatan pada partisipasi dan liberalisasi menuju poliarki yang didalamnya memberikan derajat kesempatan partisipasi dan liberalisasi yang tinggi.²¹

Dalam proses demokratisasi terdapat beberapa proses atau tahapan. Pertama, liberalisasi adalah proses pengaktifan hak-hak politik yang melindungi individu dan kelompok-kelompok sosial dari tindakan sewenang-wenang atau tidak sah yang dilakukan oleh negara atau pihak ketiga. Tahapan lain dari liberalisasi adalah transisi. Transisi bisa didefinisikan sebagai titik awal atau selang waktu antara rezim otoritarian dengan rezim demokratis. Transisi itu dimulai dari keruntuhan rezim otoritarian lama yang kemudian diikuti oleh atau berakhir dengan (instalasi) lembaga-lembaga politik dan aturan politik baru dibawah payung demokrasi. Setelah transisi, apapun hasilnya, akan diikuti dengan

²⁰ Riswandha Imawan dalam Agus Widjono (dkk), 1999, *Indonesia dalam Transisi Menuju Demokrasi*, Jakarta, Lembaga Studi Agama dan Filsafat (LSAF), halaman 56

konsolidasi. Jika transisi hanya menghasilkan otoritarianisme baru, maka konsolidasi yang terjadi adalah pemantapan rezim baru itu. Sebaliknya, jika yang dihasilkan transisi adalah instalasi demokrasi, maka rezim demokratis yang baru dilembagakan dan dikonsolidasikan.²²

Sebagai lawan dari bangun politik yang otoritarian, demokratisasi memerlukan salah satunya adalah keberanian warga negara untuk aktif dalam proses politik. Tanpa keberanian warga negara untuk menuntut hak-hak politik mereka, maka proses demokratisasi akan kembali ketitik awal. Tanpa keberanian dari warga negara untuk menuntut, mengganggu rezim untuk segera menyerahkannya. Sangat mungkin dibaca bahwa warga negara memang tidak membutuhkannya.

Jadi prinsip terpenting demokrasi adalah kewarganegaraan (*citizenship*). Ini mencakup hak untuk mendapat perlakuan yang sama dengan orang lain berkenaan dengan penentuan pilihan-pilihan bersama, dan kewajiban pihak yang berwenang untuk melaksanakan pilihan tersebut untuk bertanggung jawab pada dan membuka akses terhadap seluruh rakyat. Sebaliknya prinsip ini juga membebaskan kewajiban pada rakyat, untuk menghormati keabsahan pilihan-pilihan yang dibuat bersama secara sengaja, dan hak penguasa untuk tidak bertindak dengan kewenangan, untuk mendorong efektifitas pilihan-pilihan ini, serta untuk melindungi negara dari ancaman-ancaman atas kelangsungannya.

1.5 Hipotesa

Hipotesa merupakan dugaan yang mungkin benar, mungkin juga salah. Dia akan ditolak jika salah dan akan diterima jika fakta-fakta membenarkannya, tergantung kepada hasil-hasil penyelidikan fakta-fakta yang dikumpulkan.²³ Dengan pengertian tersebut dan dengan melihat

²¹ Robert Dahl (1971), *op.cit*

²² Sutoro Eko Yunanto, *Transisi Menuju Demokrasi Dalam Rezim Neopatrimonial di Indonesia*, Proposal Penelitian Program Studi Ilmu Politik, Program Pascasarjana Universitas Gajah Mada, Yogyakarta, halaman 15-16

²³ Sutrisno Hadi, 1997, *op.cit.*, halaman 63

gejala-gejala dan kondisi-kondisi objektif di Timor-timur yang terus mengalami perkembangan, maka penulis mengajukan hipotesa sebagai berikut:

Proses demokratisasi yang terjadi di Timor Timur berada pada tahap instalasi yaitu pengesahan lembaga-lembaga politik dan aturan-aturan politik baru dibawah payung demokrasi.

1.6 Metode Penelitian

Dalam penelitian karya ilmiah, metode merupakan salah satu syarat untuk melakukan penelitian. Dengan diterapkannya metode, akan bermanfaat dalam mendapatkan kerangka berpikir dan data-data yang dibutuhkan, dengan tujuan agar karya tulis menjadi ilmiah, sistematis dan kronologis. Pengertian metode yang diberikan oleh The Liang Gie sebagai berikut:

"Metode ialah cara atau langkah yang berulang-ulang kembali sehingga menjadi pola untuk menggali pengetahuan tentang sesuatu gejala. Pada pangkalnya ini merupakan langkah untuk mengumpulkan data-data sedangkan pada ujungnya merupakan langkah-langkah untuk memeriksa kebenaran-kebenaran dari pernyataan yang dibuat mengenai gejala itu."²⁴

Dari pengertian tersebut diatas ada dua langkah yang harus ditempuh dalam kegiatan penelitian yaitu mengumpulkan data dan selanjutnya menganalisis data tersebut.

1.6.1 Metode Pengumpulan Data

Analisa yang diterapkan dalam penulisan ini didapatkan melalui studi kepustakaan dengan menggunakan literatur yang memuat data dan informasi yang diperlukan. Dengan demikian, data yang berhasil penulis kumpulkan bersifat tidak langsung (data sekunder). Namun penulis berusaha untuk mengumpulkan data dari sumber aslinya. Pengumpulan data ini penulis lakukan dibeberapa tempat antara lain :

²⁴ The Liang Gie, 1982. *op.cit.*, halaman 103

1. Perpustakaan Pusat Universitas Jember
2. Perpustakaan FISIP Universitas Jember
3. Perpustakaan CSIS Jakarta
4. Situs-situs di internet

1.6.2 Metode Analisis Data

Analisis data yang diterapkan dalam penelitian ini adalah secara kualitatif karena data-data yang dikumpulkan tidak bisa diukur secara langsung. Sedangkan metode berpikir menggunakan apayang disebut dengan metode deduktif (*deductive thinking*) yang oleh Sutrisno Hadi dirumuskan sebagai berikut:

"Dengan deduksi kita berangkat dari pengetahuan yang sifatnya umum dan bertitik tolak pada pengetahuan yang umum itu kita hendak menilai suatu kejadian yang khusus."²⁵

Pengertian dari demokrasi bisa luas dan kompleks. Walaupun demikian, seperti disebutkan oleh Calderon dimuka bahwa esensi dari demokrasi salah satunya adalah pemilihan umum yang jujur dan adil walaupun itu bukanlah makna keseluruhan dari demokrasi itu sendiri. Pemilihan umum di Timor Timur merupakan salah satu bukti bahwa demokrasi dalam pengertian minimal ini sudah berjalan. Dalam kasus pemilihan umum di Timor Timur, proses demokratisasi walaupun masih dalam tahap awal sudah berjalan. Bagaimanapun proses demokratisasi dimasa yang akan datang membutuhkan waktu yang lama.

1.7 Pendekatan

Pendekatan diperlukan agar pembahasan dapat terfokus pada permasalahan yang dituju, sesuai dengan ruang lingkup pembahasan yang telah ditetapkan. Pendekatan merupakan cara untuk menghampiri

²⁵ Sutrisno Hadi, 1997, *op.cit.*, halaman 42

dari segi tertentu terhadap suatu masalah sehingga memungkinkan orang untuk menyelidiki, memahami dan memecahkan permasalahan.²⁶

Sebagai usaha untuk melakukan pendekatan terhadap suatu permasalahan yang diajukan, maka penulis menggunakan pendekatan sejarah politik. Politik dan sejarah memiliki kaitan yang sangat erat dan saling mempengaruhi. Peristiwa-peristiwa politik seringkali dipengaruhi oleh proyeksi sejarah. Proses demokratisasi di Timor Timur selalu terkait dengan sejarah politik di Timor Timur sendiri.



²⁶ R. Suprpto, 1997, *Hubungan Internasional: Sistem, Interaksi dan Perilaku*, Jakarta, Rajawali Perss, halaman 48

BAB II
GAMBARAN UMUM
DAN SEJARAH POLITIK DI TIMOR TIMUR

2.1 Timor Timur Sebuah Pengantar

Timor Timur merupakan sebuah wilayah kecil antara Indonesia dan Australia, yang tentu saja juga termasuk kedalam kawasan Asia Tenggara. Saat ini, wilayah ini menjadi wilayah yang merdeka, setelah beratus-ratus tahun menjadi wilayah jajahan. Keadaan perekonomian dan politik yang masih rendah disebabkan oleh tekanan yang diderita selama beratus-ratus tahun. Berikut ini adalah gambaran umum tentang Timor Timur.

2.1.1 Kondisi Geografis

Timor Timur terletak di paruh belahan timur Pulau Timor, membujur dari arah baratdaya ke timurlaut antara 8 sampai 10 derajat lintang selatan serta antara 123 hingga 127 derajat bujur timur. Disebelah utara dan timurlaut, Timor timur berbatasan dengan propinsi Maluku di Selat Wetar. Sedangkan disebelah selatan dan tenggara, Timor timur dibatasi oleh Laut Timor yang bersambungan dengan Samudera Indonesia yang membentang jauh sampai ke Australia. Bagian barat Pulau Timor termasuk kedalam wilayah Indonesia. Bagian ini dibatasi oleh satu-satunya batas darat disisi baratdaya yang secara teretonal termasuk kedalam yurisdiksi Propinsi Nusa Tenggara Timur, salah satu propinsi yang tetap menjadi bagian dari wilayah Indonesia. Wilayah Timor timur juga mencakup dua pulau kecil yaitu Pulau Jako diujung Timur dan Pulau Atauro disebelah utara Dili, serta sebuah wilayah kecil yaitu Oecusse yang terletak di Timor barat. Ibukota Timor Timur terletak di Dili dengan total luas area adalah 14.874 km² atau sekitar 9.000 mi².

Sebagian besar wilayah Timor Timur merupakan daerah yang tidak datar dan kering, dengan pegunungan mencapai ketinggian 2.963 m

atau sekitar 9.721 kaki, yaitu Gunung Tata Mailau di Plateau Tengah, dan Gunung Ramalau merupakan pegunungan penting lain. Dataran tinggi dipenuhi dengan kayu cendana dan tanaman tropis lain. Sedangkan dataran rendah sebagian besar ditumbuhi semak dan tanah berumput dengan pohon kelapa dan pohon eucalyptus. Timor Timur merupakan wilayah yang beriklim tropis dengan tekanan udara rata-rata 80F (25C).

2.1.2 Kondisi Penduduk, Ekonomi dan Budaya

Jumlah penduduk Timor Timur saat ini sekitar 800.000 orang, dan hampir seimbang jumlahnya antara laki-laki dan perempuan. Rata-rata harapan hidup laki-laki adalah 55 tahun sedangkan perempuan adalah 58 tahun. Penduduknya juga mencakup sebagian kecil masyarakat yang bukan merupakan etnik Timor timur, yaitu 2% Tionghoa, dan 20% Indonesia. Mereka adalah pedagang-pedagang Cina dan orang-orang Indonesia yang menikah dengan orang Timor Timur. Walaupun mayoritas penduduknya adalah Katolik, namun kelompok minoritas seperti Budha dan Muslim juga masih ada. Mayoritas dari mereka (katolik) disatukan oleh aspek kepercayaan tradisional utamanya yaitu animisme.

Perekonomian utamanya adalah berasal dari pertanian, terutama tergantung lahan kering seperti kopi, jagung, tembakau, kopra dan berbagai ubi-ubian. Sumber ekonomi penting lainnya adalah kayu cendana dan mutiara. Akhir-akhir ini ada rencana untuk membangun wisata dan juga perusahaan miriyak Australia dan Amerika yang bekerjasama dalam eksploitasi minyak dilaut antara Timor dan Australia. Beberapa negara donor juga berjanji bahwa pada dekade yang akan datang akan mendukung proyek-proyek pembangunan di Timor Timur.

Penduduk Timor Timur merupakan penduduk yang bervariasi dengan sejumlah kebudayaan yang berbeda. Penduduk ini juga memiliki kelompok-kelompok bahasa, yang dalam sejarahnya, Pulau Timor Timur ini lebih terbagi-bagi secara bahasa daripada penduduk bagian barat. Ada 12 kelompok etnis di Timor Timur yang masing-masing mempunyai

bahasanya sendiri. Bahasa etnik dapat dibagi menjadi dua besar bahasa sehari-hari. Pertama, Bahasa Austronesia (Tetum) digunakan oleh suku Tetum, Mambai, Tokodede, Kemak, Galoli, Idate, Waima'a dan Naueti. Kedua, bahasa Papua termasuk didalamnya trans-New Guinea digunakan oleh suku Bunak, Makasate dan Futuluku. Sebagian besar penduduk, yaitu 60%, menggunakan bahasa Tetum. Sejarah prekolonial dan kolonial selalu ditandai oleh perseteruan dan suka perang.

2.2 Sejarah Politik di Timor timur

Sejarah politik di Timor Timur setua keberadaan Timor Timur itu sendiri. Timor Timur memiliki sejarah yang sangat kompleks dan masalah-masalah yang terus mengalir serta isu-isu yang hanya bisa dimengerti dalam sebuah studi yang dipelajari dengan seksama. Fakta-fakta telah menunjukkan bahwa sejarah Timor Timur mulai dari empat setengah abad kolonialisme Portugis hingga hampir dua setengah dekade pendudukan Indonesia, merupakan sejarah yang ditandai dengan penderitaan, penindasan dan kekerasan yang tidak pernah berhenti. Pada masa itu pula Timor Timur selalu mengalami intervensi asing. Timor Timur tidak pernah bisa melaksanakan pemerintahan atau kontrol terhadap urusan dalam negerinya sendiri.

2.2.1 Masa Kolonialisme Portugis

a. Masuknya Portugis dan Pemberontakan Di Timor Timur

Pulau Timor mulai dikenal Portugis tahun 1511. pemukiman tetap pertama dibangun di Pulau Solor, Nusa Tenggara pada tahun 1566. tetapi dalam persaingan sesama pedagang Eropa, Belanda berhasil mengusir Portugis dari Solor pada tahun 1613, sejak saat itu, wilayah ini menjadi wilayah perebutan kekuasaan antara Belanda dan Portugis. Pada pertengahan abad ke-18, Belanda berhasil menegakkan kekuasaannya yang kokoh dibagian barat Pulau Timor. Ketika usaha-usaha penaklukan dilakukan, dua kekuatan secara tidak resmi muncul, bagian barat

merupakan pengaruh Belanda dan bagian Timur merupakan pengaruh Portugis. Sampai akhirnya terjadi kesepakatan yang membagi Pulau Timor hampir sama antara Belanda di barat dan Portugis di Timur. Pembagian ini pertama kali diatur dalam perjanjian Belanda-Portugal tahun 1859. penetapan terakhir mengenai perbatasan ditentukan dalam konvensi Den Haag tahun 1904 dan diratifikasi tahun 1917. Wilayah kekuasaan Portugis ini selanjutnya disebut Timor Portugis.

Timor Timur merupakan salah satu wilayah di Asia Tenggara yang paling terpencil dan terbelakang. Portugal sendiri adalah negara miskin, yang mengalami penurunan dalam perekonomiannya. Setiap penguasa yang berkuasa atas wilayah yang terbelakang menghadapi persoalan awal bagaimana menggerakkan tenaga kerja yang cukup untuk menghasilkan surplus yang bisa dialirkan kesektor-sektor lain yang bukan pertanian kebutuhan sendiri. Portugis menggunakan satu-satunya cara yang mereka miliki, yaitu menggunakan tenaga kerja paksa untuk menghasilkan akumulasi primitif di koloninya. Dengan adanya penguasa baru, yakni Portugis, rakyat Timor Timur dibebani berbagai macam tekanan dan paksaan. Rakyat dipaksa untuk melakukan kerja paksa selain itu juga harus mengumpulkan makanan dan membayar pajak sendiri. Perekonomian Timor Timur mengalami intervensi Portugis secara besar-besaran.

Sebagai langkah mengokohkan kekuasaannya, Portugis melakukan berbagai cara pemukiman, penetrasi perdagangan dan akhirnya penaklukan suatu daerah.

Untuk menguasai jalur-jalur dagang rempah-rempah dari daerah asal di Asia sampai pelabuhan Lisboa, dibentuk daerah administratif militer yang dinamakan "estado da India" yaitu suatu konsep menutup jalur-jalur perdagangan yang dikuasainya bagi musuh dan saingannya. Estado da India ini mencakup seluruh wilayah antara Tanjung Harapan, Pantai Atimur Afrika – India – Asia Tenggara, Macao/Jepang – Maluku – Timor yang berlangsung sampai 1825.

Portugis saat itu sedang berkonsentrasi di Benua Afrika dan Amerika Selatan serta di Asia yaitu Macao, Makasar dan Timor. Usaha perluasan oleh Portugis di tentang kerajaan-kerajaan pribumi. Usaha perlawanan tetap berlangsung, dari abad 16 sampai tahun 1910an. Sehingga Portugis melakukan Gerakan Pasifikasi yaitu suatu gerakan untuk menaklukkan wilayah pribumi.

Orang Timor Timur tidak puas dengan pemimpin kolonial Portugis. Ketidakpuasan ini menimbulkan sejumlah pemberontakan yang bisa dicatat. Perlawanan rakyat Oecusse pada tahun 1765 terjadi ketika rakyat dipaksa untuk bekerja berat membangun benteng di Lifau. Perlawanan oleh raja Luka tahun 1779 disebabkan karena kebebasan yang semula dimiliki oleh raja-raja berangsur-angsur hilang. Orang-orang Portugis tidak saja berdagang tetapi menjadi penguasa Timor timur. Pada hari-hari berikutnya, perlawanan kerajaan-kerajaan pribumi tetap berlangsung. Gubernur Caestino da Silva (1894-1904), berusaha menumpas perlawanan itu dengan kejam, sehingga terjadi perlawanan Manufahi.

Dari perlawanan-perlawanan yang pernah terjadi, pemberontakan terjadi pada awal abad 20, yaitu pemberontakan oleh besar-besaran pada tahun 1910 seorang-1912. dipimpin liurai¹, yang bersekutu dengan liurai lain berpusat di Manufahi dan memakan banyak korban.

b. Masa Pemerintahan Portugis di Timor Timur

Berbagai cara dari pemerintah kolonial Portugis telah diterapkan didaerah jajahan di Solor, Flores, Timor. Pada mulanya

¹ Liurai merupakan perselutuan antar *sucu* (gabungan dari 6-10 desa) yang membentuk kerajaan, berkuasa atas wilayah yang luas dan jabatan ini turun temurun, lihat Helen Mary Hill, *Gerakan Pembebasan Timor Lorosae* (Kerjasama Sahe Institute for Liberation dan Yayasan HAK DILI, Dili, 2000), hal. 2. setelah pemberontakan besar pada tahun 1910-1912 yang dipimpin oleh seorang liurai yang bersekutu dengan liurai yang lain, kedudukan liurai dihancurkan dan kerajaannya dipecah menjadi satuan kecil-kecil yang mudah dikendalikan. Sedangkan liurai baru bukanlah pewaris liurai sebelumnya tetapi diangkat dari para pemimpin yang setia pada Portugis. hal. 57

ditetapkan seorang kepala pemerintahan yang ditunjuk oleh kepala ordo Domonikan di Malaka. Kemudian ditempatkan seorang kapitan yang langsung ditunjuk dari Goa. 1698, ditentukan seorang Gubernur (Capito-Mor) sendiri untuk daerah Timor. Tetapi tidak berlangsung lama karena daerah itu jatuh ketangan Raja Muda Goa, sampai tahun 1769. setelah itu Timor berada diwilayah administratif Macao sampai 1896, dan kemudian mendapat status koloni tersendiri, diperintah oleh seorang gubernur tahun 1926.

Pemerintahan sipil Portugis di Timor Timur dimulai dengan pengangkatan Antonio Goelho Guerreiro tahun 1698. wilayah ini dipisahkan dari Goa dan menjadi propinsi tersendiri dibawah Macao. Guerreiro adalah yang pertama kali mulai menerapkan susunan pemerintahan Portugis di Timor timur. Pemerintahan di seberang lautan bersifat semi militer. Ketika pertama kali menjabat di Timor Timur, ia telah memberikan kepada liurai-liurai pangkat militer lengkap dengan surat pengangkatannya.

Liurai-liurai mendapat pangkat kolonel, datuk-datuk menjadi mayor dan kapitan. Walaupun liurai-liurai masih tetap dipilih sesuai dengan ketentuan adat, tetapi sejak 1702 pengangkatan dan upacara peneguhan dilakukan oleh gubernur dengan disertai surat pengangkatan resmi. Dengan jalan ini tercapai kepatuhan pada pemerintah Portugis.

Status koloni diubah menjadi propinsi (daerah seberang lautan yang setaraf dan sejajar dengan daerah atau propinsi lain di Portugis tahun 1961. dalam tahun 1971 propinsi Timor mendapat hak otonomi yang lebih luas, sedangkan tahun 1974, saat setelah terjadi Revolusi Bunga di Portugis, dimana daerah di seberang lautan akan diberikan kemerdekaan (hak dekolonisasi), seperti yang termuat dalam Undang-undang Dasar yang dibentuk setelah revolusi itu.

c. Dekolonisasi dan Demokrasi

Masa sesudah perang dunia, sesudah tahun 1945, merupakan masa dekolonisasi. Pandangan umum internasional terutama di majelis umum PBB berbeda tentang kolonisasi, bahwa peran negara kolonial adalah membimbing rakyat jajahannya memperoleh kemerdekaannya segera. Tetapi tekanan internasional tersebut tidak memberikan pengaruh pada Portugal. Portugal menolak untuk melaporkan wilayah-wilayahnya tahun 1956 di Majelis Umum PBB. Penolakan itu menyebabkan munculnya usaha-usaha oleh PBB sampai akhirnya diambil sikap keras oleh komite 24 PBB.²

Bagi Portugis, penentuan nasib sendiri berarti rakyat berhak berpartisipasi dalam struktur politik dan pemerintahan tertentu. Portugis tidak menganggap rakyat dikoloni bebas memilih status politiknya sendiri, termasuk kemerdekaan, dan kegiatan diplomatik mereka diarahkan untuk mencegah diperolehnya hak ini. Semua kegiatan yang bersifat politik dilarang karena bisa membahayakan pemerintahan Portugal.

Kritik internasional justru membuat Portugal semakin memperkuat genggamannya atas koloni-koloninya. Salah satu sumber pembenaran ideologis untuk upaya kolonial Portugis adalah teori tentang "Luso Tropicalismo"³ (Portugal Tropis). Digunakan secara besar-besaran untuk mempromosikan bahwa keselarasan rasial dan integrasi etnik itu merupakan ciri khas koloni Portugis.

Walaupun pada tahun 1972 di Portugal terjadi perubahan konstitusi tentang peraturan baru yang dimaksudkan untuk memberikan otonomi yang besar kepada wilayah-wilayah koloninya, tanpa

² Komite khusus yang beranggotakan 24 orang untuk penerapan deklarasi dan membuat rekomendasi mengenai pelaksanaannya. Pada sidang pertama tahun 1962 memutuskan untuk menginstruksikan kepada sekjen untuk mengumpulkan dan menyampaikan kepada komite tentang informasi yang tersedia, termasuk informasi mengenai persoalan politik, di wilayah-wilayah tanpa pemerintahan sendiri, dan juga menerima dan mendengar petisi.

³ Teori ini dikemukakan oleh orang Brasil bernama Gilberto Freyre. Menurut teori ini, bangsa Portugis secara unik punya tugas "membudayakan" ras-ras pribumi karena Portugis tidak punya prasangka sosial. Doktrin ini juga menyatakan bahwa Portugis itu lebih tinggi daripada bangsa Eropa lainnya. *Ibid.* hal. 33

mengganggu kesatuan bangsa, tetapi Timor Timur tidak mendapat perhatian dalam peraturan tersebut. Angola dan Mozambique misalnya, dinyatakan sebagai "negara" dan badan legislatifnya diberi kekuasaan yang tertentu yang kecil. Sedangkan di Timor Timur, kekuasaan sepenuhnya berada ditangan gubernur yang diangkat dari Lisboa.

Dinegaranya sendiri, Portugal menderita akibat dua kediktatoran yang akhirnya terjadi revolusi. Selama lima puluh tahun Portugal berada dibawah dua diktator Antonio de Oliveira Salazar (1926-1968) dan diktator Marcello Caetano (1968-1974). Selama Perang Dunia Kedua, energi Portugal habis untuk mengeksploitasi kekayaan 5 koloninya di Afrika. Pada tahun 1974, angkatan perang Portugal yang kalah oleh peperangan berkepanjangan yang tidak dapat dimenangkannya di Afrika, melancarkan "Revolusi Anyelir" yang mengakhiri kediktatoran sipil dan menuju kebijakan dekolonisasi. Revolusi ini menyebabkan tergulingnya Rezim Caetano pada 25 April 1974 dan digantikan oleh pemerintahan baru dibawah pimpinan Jenderal Antonio de Spinoza. Kudeta tersebut menghasilkan dua program politik yaitu politik demokratisasi dan politik dekolonisasi. Gagasan demokratisasi lahir sebagai reaksi terhadap sifat-sifat rezim lama yang otoriter dan fasisme, sedangkan gagasan dekolonisasi lahir sebagai pantulan kenyataan getirnya perang melawan para gerilyawan nasionalis kolono-koloni Afrika.

Pemerintahan baru ini membuka era baru bagi koloni-koloni Portugal termasuk Timor Timur. Pemerintahan baru ini juga berjanji untuk mengembalikan hak-hak sipil, termasuk hak-hak demokrasi sesuai dengan asas-asas demokrasi. Karena tuntutan internasional, Portugal berusaha melakukan dekolonisasi di Timor Timur dengan memperkenalkan demokra³i dengan cara memberi kebebasan bagi rakyat Timor Timur untuk membentuk partai politik dan memperjuangkan gagasan-gagasan

³ *Sejarah Timor timur sejak tahun 1974*, ditemukan di <http://www.solidamor.org/content/sejarah.htm>, diakses tanggal 8 April 2003

mereka. Selain itu, rakyat Timor Timur juga diberi kesempatan menentukan nasib mereka sendiri melalui referendum yang rencanya akan dilaksanakan pada Maret 1975. dengan demikian, pintu bendungan peredam aspirasi rakyat Timor Timur seolah-olah terbentang lebar sehingga rakyat Timor timur segera memanfaatkan kebebasan itu dengan mendirikan tiga partai politik. Uniao Democratica Timorese (UDT) lahir pada tanggal 11 Mei 1974 yang pada awalnya bertujuan memperoleh otonomi yang lebih luas dibawah naungan Portugis tapi selanjutnya UDT justru menginginkan kemerdekaan secara progresif dibawah naungan Portugis. Partai kedua yang muncul adalah Assosiacao Social Democratica Timorese (ASDT) yang kemudian berubah nama menjadi Frente Revolucionaria de Timor Leste (FRETILIN) yang didirikan pada tanggal 20 Mei 1974. Fretilin bertujuan mendirikan negara Timor Portugis merdeka berdasarkan ajaran komunis dan memperjuangkan kemerdekaan penuh bagi Timor timur. Partai ini paling radikal dan berkecenderungan kiri diantara tiga partai yang ada. Partai ketiga yang muncul adalah Assosiacao Integracao de Timor – Indonesia (AITI), karena nama tersebut dianggap terlalu terang-terangan menunjukkan ambisi teritorial Indonesia maka diganti menjadi Assosiacao Popular Democratica Timor (APODETI) pada tanggal 27 Mei 1974. Partai ketiga ini dengan tegas menyatakan tujuannya bergabung dengan Indonesia sesuai dengan tatacara internasional. Sebagian mengatakan bahwa partai ini merupakan rekayasa pemerintah Indonesia.

Muncul juga partai lain yang kurang populer yaitu KOTA daTRABALISTA. Klibur Oan Timor Asuawin (KOTA) adalah partai yang bertujuan menghayati dan mengamalkan adat-adat tradisional rakyat Timor Timur. Partai ini menyatakan kemerdekaan nyang ingin dicapai adalah sesuai dengan ketentuan-ketentuan persyaratan status geografik yang dekat dengan Timor Timur dan didirikan pada tanggal 9 November 1974. Partai yang ke-5 adalah TRABALISTA (Partai Buruh), lahir 5 September 1974. Partai ini bertujuan membela hak-hak asasi manusia

terutama bagi petani dan pegawai. Dalam memperjuangkan kemerdekaan, TRABALISTA akan membela salah satu dari ketiga partai yang akan menjadi pemenang.

Menurut J. Kristiadi, berdirinya partai-partai ini justru merugikan rakyat Timor Timur karena rakyat masih buta huruf dan rendah tingkat pendidikannya sehingga tidak dapat memanfaatkan partai-partai tersebut. Sebagai masyarakat yang masih tradisional, raja menjadi panutan sekaligus pimpinan. Kehadiran partai-partai hanya dimanfaatkan oleh tokoh-tokoh masyarakat bagi kepentingan-kepentingannya. Dengan demikian aspirasi rakyat banyak yang tidak dapat tersalurkan melalui institusi-institusi modern tersebut. Dengan latar belakang tersebut kiranya pemahaman mengenai kepartaian di Timor Timur dapat ditempatkan dalam proporsi yang lebih wajar.⁵

d. Pertikaian Antar Partai Politik dan Implikasinya

Dalam memperebutkan kekuasaan di Dili setelah Portugis tidak dapat lagi menjalankan pemerintahan, partai UDT dan Fretilin melakukan cara-cara kekerasan dan saling mengatakan diri mereka sebagai penguasa yang berkuasa di wilayah Timor Timur. Tetapi karena persamaan kepentingan, sebagai langkah selanjutnya kedua partai ini bergabung dan membentuk koalisi pada tanggal 20 Januari 1975. Dalam perkembangannya, ketiga partai politik tersebut mengalami pertentangan yaitu antara UDT dan APODETI dengan Fretilin. Fretilin dianggap banyak melakukan kekejaman terhadap anggota UDT sehingga kerjasama dalam bentuk koalisi itu bubar pada tanggal 27 Mei 1975. Secara politis kedua partai itu berbeda secara fundamental, UDT menganut pola politik yang berbau konservatif-moderat sedangkan Fretilin menganut pola politik kekiri-kirian yang ekstrim. Fretilin cenderung kearah komunis dan semakin

⁵ J. Kristiadi, *Dekolonisasi Timor timur*, terdapat dalam *Analisa*, no 11, CSIS, Jakarta, 1986, hal. 963

lama semakin dikuasai oleh komunis dan cara-cara perjuangannya dianggap membahayakan kepentingan rakyat di Timor timur.

Pertentangan itu tampak sekali pada saat pertemuan di Macao (dalam rangka melakukan dekolonisasi) pada tanggal 26-28 Juni 1975 yang dihadiri oleh UDT dan APODETI sedangkan Fretilin tidak hadir. Dalam keadaan ini Fretilin melepaskan tuntutan awalnya atas kemerdekaan Timor Timur dan sebaliknya mendukung suatu rumusan yang disetujui dalam pertemuan Macao. Fretilin memboikot pertemuan itu dan menolak hasilnya. Tetapi karena didesak oleh keadaan di Timor Timur, Fretilin akhirnya menyetujui hasil pertemuan itu yaitu persetujuan untuk mengadakan pemilihan di Timor Timur sekitar Oktober 1976.

Kudeta UDT mencapai puncaknya menjelang tanggal 11 Agustus 1975, dimana ribuan anggota UDT mengadakan demonstrasi di Dili dengan maksud untuk mengusir Mayor Mota dan Mayor Yonatas yang dianggap berhaluan kiri atau komunis dan mempunyai peranan paling aktif dalam membantu Fretilin. Sekalipun pada tanggal 11 Agustus 1975 UDT berhasil merebut kekuasaan, namun tidak bertahan lama, karena Fretilin ganti menyerang UDT dengan bantuan Portugis, sehingga UDT mundur. Ditengah pertempuran tersebut, gubernur Portugal beserta stafnya, para dokter dan anggota militer secara diam-diam meninggalkan Dili. Sejak itu tidak ada lagi pemerintahan Portugal. Penyerahan kekuasaan tidak pernah diberikan, dekolonisasi tidak pernah diselesaikan. Kenyataan ini menyadarkan para pemimpin UDT bahwa satu-satunya cara penyelesaian masalah Timor Timur yang paling baik adalah berintegrasi dengan Indonesia. Akhirnya UDT bersama Kota dan TRABALISTA menyampaikan petisi kepada presiden RI untuk menyatakan bergabung dengan Indonesia pada tanggal 7 September 1975.

Dalam serangan balik Fretilin, Fretilin memenangkan perang sehingga secara *de facto* Fretilin menguasai Timor timur. Para pemimpin Fretilin dengan segera membentuk pemerintahan dan memprakarsai program-program di bidang sosial, kesehatan, pendidikan dan pendidikan

politik. Perkembangan politik di Timor Timur mengalami keadaan paling kritis ketika intervensi militer oleh Indonesia bersama-sama dengan penolakan Portugal untuk kembali dan menanggapi secara serius himbauan Fretilin untuk memberikan bantuan politik. memaksa Fretilin secara sepihak untuk memproklamasikan "Republik Demokrasi Timor timur", kemudian menetapkan Xavier do Amaral sebagai presiden sekaligus untuk menyerukan bantuan internasional, hal ini terjadi karena Portugal tidak menanggapi secara serius himbauan Fretilin untuk memberikan bantuan politik⁶ sekaligus untuk menyerukan bantuan internasional. Hal ini menimbulkan proklamasi tandingan yang dilakukan atas tindakan sepihak yang dilakukan oleh Fretilin yang dikenal dengan nama Proklamasi Balibo. Pada intinya proklamasi ini memproklamasikan wilayah Timor Timur sebagai bagian dari Indonesia, dan merupakan gerakan gabungan antara UDT, APODETI, KOTA, dan TRABALISTA.

2.2.2 Dibawah Rezim Militer Indonesia

a. Invasi Dan Intervensi Militer Oleh Indonesia

Keterlibatan Indonesia di Timor Timur sudah terjadi sejak tahun 1974, baik melalui diplomasi maupun penyusupan militer. Kepentingan Indonesia di Timor Timur adalah dihindarinya kemungkinan ancaman terhadap keamanannya, yang mungkin timbul akibat politik yang tidak menentu di wilayah koloni yang berdampingan itu. Afiliasi munculnya gerakan radikal di Timor Timur yang berasal dari Fretilin bisa menimbulkan tantangan terhadap kepentingan keamanan Indonesia.

Invasi oleh kekuatan militer Indonesia dilancarkan pada pagi buta tanggal 7 Desember 1975, 9 hari setelah Fretilin mengumumkan kemerdekaannya. Laporan-laporan saksi mata tentang penyerbuan tersebut mengindikasikan bahwa terjadi tindakan-tindakan kekejaman pembunuhan. Pada tanggal 18 Desember 1975, Indonesia

⁶ Bantarto Bandoro, *Dimensi Internasional Masalah Timor Timur*, terdapat dalam *Analisa* no. 11, CSIS, Jakarta, 1996, halaman 968

mengumumkan pembentukan Pemerintah Sementara Timor Timur (PSTT) dan menyelenggarakan upacara di kapal perang di pelabuhan Dili dengan melantik Arnaldo dos Reis Araujo sebagai gubernur dan Fransisco Lopez da Cruz sebagai wakil gubernur. Namun demikian, keadaan disana tidak setenang yang dikatakan Indonesia, karena kurang dari seminggu kemudian tanggal 25 Desember 1975 mereka mengadakan invasi yang kedua, yang lebih besar dibandingkan dengan invasi yang pertama. Atas desakan Portugis (yang masih dianggap sebagai negara kolonial Timor Timur oleh PBB), PBB meminta agar Indonesia menghentikan invasi militer. Tetapi Indonesia menjawab bahwa apa yang dilakukannya adalah bukan invasi melainkan "sukarelawan" yang menjawab seruan menolong koalisi anti-Fretilin dan atas dasar kedekatan wilayah dan kebudayaan. Sejak saat itu mustahil bagi siapapun saja untuk masuk dan keluar wilayah Timor Timur.

Intervensi Indonesia tersebut merupakan cerminan keinginan Indonesia untuk menyatukan wilayah Timor Timur kedalam wilayahnya. Penyatuan wilayah Timor Timur ini "direstui" oleh Australia yang diwakili oleh Perdana Mentri Gough Whitlam dan Presiden Amerika Serikat Gerald Ford. Bantuan untuk melawan Fretilin dari kedua negara tersebut adalah dilandasi oleh atmosfer Perang Dingin yang menyadarkan akan ketakutannya dari pengaruh domino di Asia Tenggara.

Indonesia telah mengerahkan seluruh tenaganya pada tahun 1974-1975 untuk memenangkan posisi Indonesia atas Portugal. Hal ini terbukti pada pertemuan London, Maret 1975, dimana perwakilan bangsa Indonesia (Ali Moertopo) mencoba membelokkan sikap Portugal untuk menyetujui hal-hal berikut:⁷

1. Satu-satunya jaminan untuk stabilitas daerah adalah integrasi Timor Timur dengan Indonesia

⁷ George Junus Aditjondro, *FUNU: Perjuangan Timor Lorosae Belum Selesai*, (Solidamor, Jakarta, 1998) halaman 104

2. Kreasi gabungan pemerintah Portugal dengan Indonesia akan menjadi penasehat dan mendorong rakyat lokal untuk menyetujui integrasi dengan Indonesia
3. Portugal sebaiknya tidak membuat masalah Timor Timur menjadi masalah Internasional.

Dari pertemuan ini, dapat dipahami bahwa Indonesia sangat terang akan niatnya menuju masalah integrasi Timor Timur meskipun Indonesia berjanji untuk tidak melakukan intervensi masalah Timor Timur. Namun perwira-perwira ambisius seperti Moerdani, Pangabean dan lain-lainnya berusaha untuk melakukan intervensi karena bagi mereka, Timor Timur merupakan suatu ekspedisi yang dengan mudah mempromosikan jabatan mereka. Sebuah skenario telah disiapkan untuk membenarkan tentara Indonesia. Misalnya: ratusan orang Timor Timur yang telah mendapatkan latihan militer dari pasukan komando Indonesia dikirim kembali ke Timor Timur dan mulai menyerang kampung-kampung, merampas dan membakar daerah Timor Timur. Tindakan itu diatur oleh unit khusus dari Indonesia. Sementara itu para diplomat Indonesia membanjiri kedutaan besar asing dengan laporan tentang "perang terbuka" diantara semua orang Timor dan lain-lain.⁵

Berkaitan dengan masalah intervensi ini, Indonesia melakukan pendekatan dua arah. Didepan umum, Indonesia menyangkal setiap langkah intervensi sepihak, sedangkan dibelakang semua itu, secara diam-diam Indonesia telah melangkah maju dengan operasi militer tersembunyi di Timor Timur.

b. Timor Timur Sebagai Propinsi ke-27 Indonesia

Setelah muncul Proklamasi Balibo pada tanggal 30 November 1975, diikuti oleh pernyataan masyarakat Timor Timur yang ingin bergabung dengan Indonesia pada tanggal 12 Desember 1975 di Kupang, kemudian disusul dengan pembentukan PSTT tanggal 17 Desember,

⁵ *Ibid.*, halaman 106

maka keinginan Indonesia agar keinginan rakyat dilegalisir terlebih dahulu telah terpenuhi dan sekaligus memenuhi tuntutan politik internasional yang menghendaki penentuan masa depan Timor Timur berdasarkan atas keinginan rakyat.

Pada tanggal 31 Mei 1976 DPR wilayah Timor Timur yang telah terbentuk melangsungkan sidang paripurna terbuka dengan acara tunggal membahas integrasi Timor Timur kedalam wilayah Indonesia. Sidang Majelis Rakyat Regional yang diadakan oleh pemerintah sementara itu diadakan dibekas gedung olahraga di Dili. Para jurnalis diperbolehkan masuk wilayah Timor Timur untuk menyaksikan sebuah upacara dimana 37 "Majelis Permusyawaratan Rakyat" secara aklamasi menyetujui petisi untuk berintegrasi dengan Indonesia. Walaupun begitu, Dewan Keamanan PBB, Sekjen PBB, dan Komisi Khusus PBB tentang dokolonisasi menolak undangan untuk menghadiri acara ini karena mereka tidak menganggap upacara ini sebagai pernyataan penentuan nasib sendiri yang memenuhi syarat.

Untuk merealisasikan sidang paripurna tersebut, 5 Juni 1976, suatu delegasi sebanyak 41 orang Timor Timur dipimpin oleh ketua PSTT (gubernur sementara), Arnaldo dos Reis Araujo tiba di Jakarta untuk menyampaikan petisi. Guna menanggapi petisi tersebut, Presiden Soeharto mengirim 36 delegasi pemerintah Indonesia yang dipimpin oleh Menteri Dalam Negeri Amir Machmud untuk menyaksikan sendiri ke Timor Timur.

Selanjutnya dalam Sidang Kabinet Paripurna, 29 Juni 1976 yang dipimpin oleh Presiden Soeharto, setelah mendengar laporan ketua delegasi ke Timor Timur tersebut, berkesimpulan bahwa petisi PSTT-DPR Timor Timur pada tanggal 7 Juni 1976 memang mencerminkan keinginan rakyat Timor Timur.

Pada tanggal 15 Juli 1976, melalui sidang plenonya, DPR secara aklamasi telah menyetujui disahkannya RUU tersebut menjadi UU tentang penyatuan Timor Timur kedalam Republik Indonesia melalui UU

No. 7 Tahun 1976 dan ditandatangani oleh Presiden Soeharto tanggal 17 Juli 1976, dengan mengangkat Arnaldo dos Reis Araujo sebagai gubernur dan Fransisco Lopez da Cruz sebagai wakil gubernur. Kenyataannya kedaulatan Indonesia tidak diakui sepenuhnya baik oleh PBB maupun Timor Timur sendiri. Sampai saat itu, Indonesia tidak mengajukan klaim sejarah atas Timor Timur, yang bukan merupakan bagian dari Hindia-Belanda.

Selama periode pendudukan Indonesia, selama itu pula rezim militerisme Soeharto memerintah. Bahasa Indonesia menjadi bahasa resmi dan anak-anak muda didoktrin dalam ideologi negara. Pembangunan-pembangunan dilakukan, beberapa jalan raya dan infrastruktur didirikan. Tentara Indonesia terus-menerus melakukan kekerasan terhadap masyarakat dan dari hari-hari pertama pendudukan, lebih dari 200.000 orang Timor Timur terbunuh. Serangan besar-besaran berlanjut selama 4 tahun. Peperangan merupakan ciri utama pendudukan militer di Timor Timur. Kejahatan perang dan pelanggaran HAM seringkali tercatat dalam pertempuran melawan pro-kemerdekaan.

Sejak berlangsungnya penyerbuan, Timor Timur secara nominal diperintah oleh seorang gubernur. Tetapi kekuasaan sipil berada ditangan wakil gubernur yang biasanya seorang militer. Sedangkan masalah keamanan yang peka harus diratifikasi oleh komandan militer Indonesia, yang lewat komandan teritorialnya di Bali, tunduk kepada markas besar di Jakarta. Kekuasaan akhir terletak ditangan militer. Contoh seperti ini pernah terjadi tahun 1980an ketika Gubernur Mario Carrascalao, seorang Timor, minta untuk mengunjungi seorang kenalannya yang ditanan, namun ijin ditolak oleh komandan militer.⁹

Akses kepada hukum lewat pengadilan bukan merupakan pilihan yang berlaku di Timor Timur, dimana semua "undang-undang" disalurkan lewat kekuatan, oleh komandan militer. Sampai tahun 1989 Timor Timur merupakan koloni tertutup militer Indonesia. Tidak ada akses

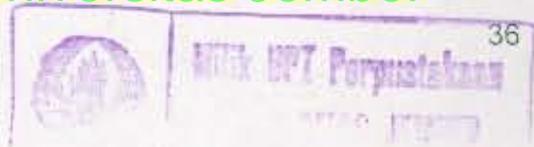
⁹ 1974 *Sejarah Timor Timur Sejak Tahun 1974*, op. cit. . tanpa halaman

media yang diperbolehkan, jadi sekalipun laporan-laporan kekerasan dan pelanggaran HAM mencapai dunia luar, satu-satunya versi resmi adalah versi angkatan darat Indonesia. Larangan tentang akses mencegah para wisatawan barat, warganegara Indonesia atau bahkan setiap orang luar untuk mengunjungi Timor Timur dengan akibat bahwa orang Timor Timur merasa dirinya dilupakan oleh dunia luar, dan menjadi semakin putusasa. Walaupun lebih dari dua puluh tahun Indonesia menempatkan sejumlah besar pasukan militer maupun pesawat tempur yang canggih, tetapi pendudukan itu gagal mencapai tujuan awalnya yaitu mengintegrasikan Timor Timur kedalam wilayah Indonesia.

Dalam masalah ekonomi, ekonomi lokal dikontrol oleh orang-orang Indonesia. Dan beberapa orang Timor Timur loyal pada mereka. Indonesia melakukan intervensi besar dibidang prasarana Timor Timur, dan khususnya dalam penyediaan jalan beraspal, jembatan, sekolah, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, dan kantor pemerintah di Dili dan kota-kota lain yang lebih kecil. Pembangunan ini tak meragukan lagi adalah juga untuk keperluan transportasi pasukan secara cepat dan sekolah-sekolah digunakan untuk penyerapan dengan cepat pemuda Timor kedalam cara berpikir pemerintah Indonesia secara terpusat. Selama dua puluh empat tahun menjadi wilayah Indonesia, Timor Timur menjadi wilayah yang terbelakang dalam pertumbuhan ekonominya dibandingkan dengan propinsi-propinsi lain di Indonesia.

c. Kebijakan baru pemerintahan Habibie

Selama pemerintahan Indonesia, perlawanan dari rakyat Timor Timur masih terus berlangsung, terutama digerakkan oleh Fretilin. Pada tanggal 7 Mei 1977, pasukan Fretilin mengklaim bahwa mereka menguasai 80 persen wilayah Indonesia, sehingga Majelis Umum PBB menolak integrasi Timor Timur kedalam wilayah Indonesia dan menyerukan penentuan nasib sendiri dilaksanakan. Pada sebuah laporan kepada Dewan Ekonomi dan Sosial PBB tahun 1994, Bacre Waly Nduaye,



pelapor khusus untuk eksekusi ekstra yudisial,¹⁰ sumir menyeluruh atau sewenang-wenang, mencatat berulangnya dugaan bahwa terjadi kematian dalam jumlah besar di Timor Timur. Dia menulis bahwa antara tahun 1975 sampai 1980 diperkirakan 100.000 orang penduduk dibunuh oleh pasukan bersenjata Indonesia. Antara tahun 1980 sampai 1984, diduga 100.000 orang lainnya meninggal. Sementara Indonesia gagal untuk mendapat pengakuan legal atas dimasukkannya Timor Timur, sejak dekade 1970 hingga awal 1990.

Gelombang mulai pada tanggal 12 November 1991 sewaktu pasukan Indonesia membunuh sejumlah besar pemrotes yang tidak bersenjata di pemakaman Santa Cruz di ibukota Timor Timur, Dili. Nduaye memperkirakan antara 150 sampai 270 orang yang terbunuh. Indonesia menangkap dan menuduh Xanana Gusmao sebagai otak demonstrasi di Santa Cruz tersebut.

Dorongan selanjutnya untuk gerakan penentuan nasib sendiri terjadi pada tahun 1996, sewaktu dua buah hadiah nobel yang sangat bergengsi dianugerahkan kepada dua tokoh Timor Timur, Uskup Carlos Filipe Ximenes Belo, pimpinan gereja di Dili, dan Jose Ramos Horta, pimpinan perlawanan Timor Timur dalam pengasingan, atas "karya mereka untuk suatu penyelesaian tepat dan damai" mengenai pertentangan di Timor Timur. Pada tahun 1997, Sekjen PBB yang baru Kofi Annan melakukan pendekatan yang lebih proaktif dengan tujuan revitalisasi proses tripartit di Timor Timur yang melibatkan sekretariat PBB, Indonesia dan Portugal.

Pada bulan Mei 1998, Soeharto turun dari jabatannya setelah 32 tahun memerintah, dan digantikan oleh wakil presidennya B.J. Habibie, yang sebelumnya sedikit hubungannya dengan kebijaksanaan mengenai masalah Timor Timur di Indonesia.

¹⁰ Departemen Penerangan Publik PBB, *PBB dan Timor Lorosae: Penentuan Nasib Sendiri Melalui Jajak Pendapat*, New York, 2000, halaman 5-6

Karena situasi yang terjadi di dalam negeri dan tuntutan internasional, Habibie membawa sikap segar terhadap masalah Timor Timur. Dalam bulan Juni 1998, Indonesia menginformasikan pada Sekjen PBB dan Portugal kesediaannya untuk memberi otonomi luas bagi Timor Timur, dimana Jakarta tinggal punya kendali atas tiga bidang: urusan hubungan luar negeri, pertahanan terhadap luar, dan beberapa aspek kebijakan moneter dan fiskal. Dalam bulan Agustus, saat bertemu dengan Sekjen, Menteri Luar Negeri Indonesia dan Portugal sepakat mengadakan pembicaraan lebih jauh. Para menteri juga sepakat bahwa warga Timor Timur harus lebih didekatkan dengan proses tersebut. Janji ini diterima dengan lega didalam dan diluar negeri. Ditambah dengan iklim demokratisasi dan kebebasan mengemukakan pendapat, maka para elite politik Timor Timur yang tadinya saling bertentangan mulai saling mencari dan menyusun usaha dialog untuk rekonsiliasi. Dalam rangka itu disetujui pula kesejajaran tuntutan politik antara integrasi dan referendum. Melalui dialog-dialog selanjutnya, prinsip dialog dan rekonsiliasi serta integrasi dan referendum akan di sosialisasikan secara damai dikalangan masyarakat Timor Timur.

Pada tanggal 27 Januari 1999, Presiden Habibie mengumumkan bahwa bila rakyat Timor Timur tidak dapat menyetujui menjadi bagian dari Indonesia atas rencana otonomi yang sedang dalam negosiasi, mereka dapat memisahkan diri dari Indonesia. Kebijakan "pilihan kedua" itu banyak ditentang oleh kekuatan Indonesia terutama TNI. Bagi pengamat politik, Arbi Sanit, apa yang dilakukan Habibie sudahlah benar. Secara politis Habibie tidak bersalah, ia justru melaksanakan demokrasi karena bagaimanapun kemerdekaan adalah hak warga Timor Timur.¹¹ Langkah negosiasi dipercepat, dalam sebuah pertemuan di New York antara tanggal 28 Januari sampai 5 Februari, detail rencana otonomi didiskusikan oleh pejabat kedua negara. Mereka

¹¹ Komentari Arbi Sanit dalam *Panji Masyarakat*, *Dewi Fortuna Tak Berpihak Pada Habibie*, *Panji Masyarakat* no. 22 tahun III, 15 September 1999, halaman 35

bertemu kembali tanggal 10 sampai 11 Maret 1999. Pada tahap final dari negosiasi terjadi perlawanan dengan dilatarbelakangi meningkatnya pelanggaran politik di Timor Timur. Pada tanggal 6 April, milisia pro-integrasi membunuh lebih dari 25 orang warga sipil. 17 April kembali membunuh setidaknya 13 orang. Pada tanggal 21 April, Komisi Perdamaian dan Stabilitas dibentuk di Dili, dibawah pengawasan panglima TNI Jendral Wiranto.

Permusyawaratan di New York antara 21 sampai 23 April ditutup dengan menyimpulkan tiga perjanjian memberi garis besar mengenai proses jajak pendapat. Pada tanggal 5 Mei 1999, dalam suatu upacara bersejarah di New York, ketiga perjanjian menyeluruh tersebut ditandatangani. Isinya mengenai persetujuan-persetujuan untuk menakhiri sengketa antara Indonesia dengan Portugal menyangkut Timor Timur.

Jajak Pendapat dilaksanakan pada tanggal 30 Agustus 1999 dan dihadiri oleh 96 persen pemilih. Hasilnya diumumkan tanggal 4 September 1999 oleh Sekjen PBB Kofi Annan dimana disebutkan bahwa 78,5 persen pemilih yang terdaftar menolak otonomi khusus yang ditawarkan oleh Indonesia dan memilih merdeka.

BAB III
DINAMIKA POLITIK MENJELANG
PEMILIHAN UMUM PERTAMA DI TIMOR TIMUR

3.1 Kelompok-kelompok Yang Berperan Penting Dalam Proses Transisi Politik

Setelah melepaskan diri dari Indonesia, maka tugas penting yang segera muncul adalah bagaimana Timor Timur melakukan transisi politik untuk mempersiapkan sebuah pemerintahan. Kelompok-kelompok yang berperan penting dalam membentuk transisi politik di Timor Timur ada empat kelompok.¹ Pertama, United Nations Transitional Administration in East Timor (UNTAET) dan personelnnya yang terdiri dari polisi dan militer PBB. Kelompok kedua, komunitas politik Timor Timur termasuk partai politik dan masyarakat sipil. Kelompok ketiga, masyarakat biasa atau penduduk Timor Timur secara umum. Dan kelompok yang keempat adalah Gereja Katolik serta kelompok keagamaan lain.

UNTAET merupakan badan dibawah PBB yang menerima mandat dari dewan keamanan PBB untuk mempersiapkan sebuah negara baru. Dewan ini dibekali dengan kekuasaan, dana, dan keahlian. Misi ini dibawah kepemimpinan Sergio Viera de Mello, seorang diplomat asal Brasil yang berpengalaman membentuk pemerintahan sipil di Kosovo. UNTAET yang mewakili PBB, memperoleh mandat yang melebihi misi-misi penjaga perdamaian biasa. Tugas ini sesuai dengan resolusi Dewan Keamanan PBB No. 1272 tahun 1999. UNTAET diberi tanggung jawab menyeluruh atas pemerintahan Timor Timur dan diberi kekuasaan untuk menjalankan otoritas legislatif dan eksekutif termasuk pelaksanaan pengadilan dengan tugas utama antara lain: a) menyediakan keamanan serta menegakkan hukum dan taat tertib diseluruh wilayah; b) membentuk

¹ Dionisio Babo-Soares dalam Hadi Soesastro (eds), *Peace Building and State Building in East Timor*, Jakarta: CSIS, 2002, halaman 13

pemerintahan yang efektif; c)membantu didalam pembangunan pelayanan sipil dan pelayanan sosial; d)menjamin koordinasi dan memprakarsai bantuan kemanusiaan, bantuan rehabilitasi dan pembangunan; e)mendukung kapasitas building bagi pemerintahan sendiri; f)membantu dalam pembentukan kondisi bagi pembangunan yang mendukung. Dengan kekuatan mandat yang dimiliki itu, UNTAET bekerja hampir seperti pemerintahan.²

Keputusan pembentukan pemerintahan transisi itu diambil secara bulat oleh 15 anggota Dewan Keamanan PBB pada hari senin 25 Oktober 1999. UNTAET dalam melaksanakan pemerintahan transisi akan didukung oleh ratusan pejabat sipil dan hampir 11.000 tentara dan polisi selama dua hingga tiga tahun sampai Timor Timur merdeka.³

Dewan ini, walaupun bekerja seperti sebuah pemerintahan, tetapi tidak memelihara hubungan dengan masyarakat Timor Timur sejak awal kedatangannya. UNTAET bertanggung jawab kepada Markas Besar PBB di New York dan menjadi sebuah lembaga yang terpisah walaupun secara fisik berada di Timor Timur.

Kelompok kedua yaitu komunitas politik di Timor Timur, yang secara aktif terlibat dalam proses politik dan kadang-kadang juga bertindak sebagai oposisi. Sejak awal mereka beranggapan bahwa UNTAET akan membangun hubungan administratif dan hubungan politik dengan orang Timor Timur, tetapi kenyataannya tidak demikian. Kelompok ini mulai bekerja, sebagian besar melalui kelompok-kelompok kepentingan, tetapi menjadi terlibat didalam politik setelah mengakui bahwa UNTAET tidak mempunyai rencana untuk melibatkan orang Timor Timur didalam transisi administrasi. Tugas dari kelompok ini adalah untuk mendesak partisipasi masyarakat dalam mempersiapkan pemerintahan dimasa depan.

² Resolusi Dewan Keamanan PBB No. 1272 (1999), diadopsi pada pertemuan DK PBB ke-4075 tanggal 25 Oktober 1999, dapat ditemukan di <http://www.un.org/peace/timor/docs/9931277E.htm> diakses tanggal 5 Oktober 2002

³ Koran Kompas, *Timor Timur Ditangan PBB*, terbit 27 Oktober 1999

Masyarakat sipil merupakan kelompok yang terdiri dari LSM dan organisasi sukarela yang bekerja dengan mengambil bagian dalam penyediaan bantuan kemanusiaan, memfokuskan pada latihan-latihan, membela dan memberi informasi bagi masyarakat.

Masyarakat biasa atau penduduk secara umum merupakan kelompok yang tidak mempunyai kekuatan dan tidak mempunyai peran penting dalam politik. Mereka percaya pada kelompok kedua untuk memperjuangkan kepentingannya. Belakangan ini mereka mulai giat mendesak agar mempunyai partisipasi yang lebih besar pada hal-hal yang berhubungan dengan hak-hak anggotanya.

Gereja Katolik dan kelompok keagamaan lain merupakan kelompok yang tidak bersifat politis. Namun, karena kedudukan moralnya, Gereja Katolik seringkali bertindak sebagai "penengah" diantara kelompok pertama dan kelompok kedua serta kekuatan moral diantara kelompok-kelompok politik dan masyarakat sipil.

3.2 Tuntutan Demokratisasi Bagi Timor Timur

Sejak hari-hari pertamanya tiba di Timor Timur, orang Timor Timur beranggapan bahwa UNTAET akan bekerja untuk mempersiapkan sebuah negara bersama-sama dengan masyarakat lokal. Sejak tidak ada orang Timor Timur yang ditempatkan pada struktur politik, setidaknya dari September 1999 sampai Januari 2000, toleransi masyarakat terhadap cara kerja UNTAET yang eksklusif tidak bisa dibendung lagi, setelah itu ketidakpuasan mulai tumbuh.⁴

Sejak pertama kali kedatangannya, UNTAET hanya diakui oleh Dewan Nasional Perlawanan Timor Timur (CNRT),⁵ yang diketuai oleh

⁴ Dionisio Babo-Soares, *op.cit.*, halaman 23

⁵ Conselho Nacional da Resistencia Timorese (CNRT) atau Dewan Nasional Perlawanan Timor Timur didirikan pada konferensi Di Portugal tanggal 23-27 April 1998 sebagai payung dari berbagai macam organisasi pro kemerdekaan. Dewan ini dibentuk untuk merestrukturisasi perjuangan yang inklusif dan non partisipan. Perluasan dan penyatuan perlawanan ini juga termasuk pengundutan diri Xanana Gusmao dari Fretilin dan keputusan Fretilin untuk membatalkan pernyataannya sebagai satu-satunya

Jose Alexander Xanana Gusmao atau yang lebih dikenal dengan Xanana Gusmao dan menawarkan untuk bekerja dengan dewan ini sebagai rekan kerja tetapi tidak berhubungan secara administratif. Dengan kata lain, CNRT dan Xanana Gusmao hanya membantu UNTAET atas dasar sukarela. CNRT dipercaya oleh UNTAET karena kemampuannya merangkul semua golongan untuk berjuang bagi kemerdekaan Timor Timur.

Ketidakpuasan masyarakat tidak saja tumbuh melawan UNTAET tetapi juga melawan CNRT atas ketidakmampuannya menekan UNTAET untuk melibatkan orang-orang Timor Timur didalam administrasi. Ketidakpuasan ini utamanya datang dari partai politik utama pembentuk CNRT, Fretilin dan UDT.

Menghadapi kondisi yang tidak menentu, CNRT mengadakan Kongres Nasional Terbuka yang pertama tanggal 20-30 Agustus 2000. Kongres ini diikuti oleh 500 partisipan dari seluruh wilayah yang mencerminkan kekecewaan atas UNTAET dan kekecewaan terhadap kegagalan CNRT untuk meyakinkan UNTAET agar lebih memperhatikan hak politik masyarakat. Dalam keputusannya, kongres menyarankan agar UNTAET mempercepat proses "Timorisasi"⁶ dan mengambil sebuah strategi yang lebih inklusif dengan menempatkan staf-staf administrasi dari orang-orang Timor Timur dan mengurangi sejumlah staf internasional. Kongres ini juga memperlihatkan peranan penting CNRT sebagai forum politik yang luas untuk berbagi informasi dan debat pendapat. Meskipun demikian, kongres ini ditandai juga dengan konflik internal antara pimpinan

representasi masyarakat Timor Timur yang sah. Kemudian pengangkatan Xanana sebagai presiden CNRT dan Ramos Horta sebagai wakilnya. CNRT kemudian membentuk sayap militer dengan nama Forças Armadas da Libertação de Timor Leste (Falintil) atau Angkatan Bersenjata Pembebasan Bersenjata Rakyat Timor Timur, sebagai non partisan, angkatan nasional dan pengakuan fungsi semua pihak nasionalis –seperti mahasiswa dan partai-partai politik- dalam perjuangan untuk menentukan nasib. Mengangkat Xanana Gusmao sebagai Panglima dan Taur Matan Ruak sebagai wakilnya.

⁶ Suatu proses dimana menempatkan orang-orang Timor Timur dalam struktur pemerintahan sementara sampai pemilihan umum diadakan.

CNRT dan partai-partai politik. Fretilin meminta UNTAET mempertimbangkan Fretilin daripada CNRT. Hal ini tentu saja karena menyangkut nasib politik di Timor Timur. Tuntutan ini juga ditunjukkan melalui satu dari keputusan konferensi yang menempatkan semua anggota partai Fretilin bekerja untuk CNRT dibawah kepemimpinan langsung. Akibat dari kongres itu, Fretilin dan UDT (sampai taraf tertentu) menolak semua keputusan yang dibuat selama kongres dan secara resmi mengundurkan diri dari CNRT. Fretilin dan UDT yang merupakan pilar CNRT menolak untuk ikut serta dalam badan tetap CNRT sejak kongres. Hal ini tentu saja telah menurunkan CNRT ke suatu forum partai-partai minoritas dan karenanya melemahkan fungsinya sebagai pemersatu nasional dan meningkatkan ketergantungan UNTAET kepada Xanana Gusmao.

Tetapi keretakan didalam tubuh CNRT ini seharusnya tidak ditafsirkan sebagai perpecahan menuju konfrontasi diantara kelompok-kelompok politik yang ada di Timor Timur.⁷ Pertama, pemisahan ini penting bagi kepentingan internal masing-masing partai politik. Sejumlah partai politik juga mulai melakukan restrukturisasi dirinya dan beberapa diantaranya membubarkan diri. Kedua, ada perasaan bahwa UNTAET tidak memberikan jalan masuk bagi masyarakat lokal, dan bahwa CNRT telah gagal untuk memperjuangkan partisipasi yang lebih besar bagi orang Timor Timur dalam pemerintahan. Oleh karena itu dirasa perlu untuk menggunakan cara lain. Ketiga, keputusan itu penting bagi masyarakat sipil dan partai politik untuk memulai mendorong Timorisasi dalam administrasi transisi.

Berbagai demonstrasi melawan UNTAET dan meminta UNTAET agar lebih banyak berkonsultasi dengan masyarakat serta membagi kekuasaan lebih besar kepada masyarakat merupakan hal yang sudah biasa terjadi di Timor Timur. Banyak sarjana Timor Timur yang lebih memilih bekerja untuk LSM-LSM lokal atau internasional daripada

bergabung dengan UNTAET. Keadaan ini dipicu oleh fakta bahwa beberapa pemimpin politik lokal menganggap sarjana Timor Timur dari Indonesia, yang merupakan 98% dari sarjana Timor Timur lulusan universitas mempunyai kualitas dibawah standard untuk bekerja secara profesional. Diskusi-diskusi dilakukan diantara LSM-LSM lokal dan pemuda menyangkut isu-isu seperti proses transisi, kebutuhan untuk berunding dengan masyarakat, tentang hak-hak mereka dan memasukkan orang-orang Timor Timur dalam pemerintahan transisi. Beberapa aktivis menjadi partai politik –seperti partai sosialis dan partai buruh- yang secara aktif terlibat dalam rapat-rapat umum melawan administrasi.

3.3 Proses Timorisasi di Timor Timur

Sekitar bulan Mei sampai juni 2000, pada sebuah Konferensi Pembangunan yang diadakan oleh CNRT, Sergio Viera de Mello (ketua UNTAET) dan Peter Galbraight (ketua urusan politik) setuju untuk melibatkan orang Timor Timur dalam kabinet.⁸ Hal ini merupakan tantangan bagi mandat UNTAET semula, dimana menurut bentuk dari Markas Besar di New York tidak memasukkan struktur paralel. Keputusan ini dilakukan karena kebutuhan dan tuntutan dari masyarakat Timor Timur.

Dewan nasional baru dibentuk pada bulan Juli 2000, dan memulai perannya sebagai Dewan Legislatif sementara yang semuanya ditempati oleh orang Timor Timur pada 23 Oktober 2000.⁹ Menurut peraturan awal, dewan ini akan terdiri dari 33 orang dan beberapa anggota tambahan dari perwakilan partai politik yang berbeda (dari dalam maupun dari luar CNRT), kelompok-kelompok keagamaan, organisasi sipil, dan perwakilan distrik (yang jumlahnya ada 13 distrik). Pada pembentukan Dewan nasional itu Xanana Gusmao dipilih sebagai juru bicara dan ketua dewan. Masyarakat menerima penunjukan itu dengan antusias.

⁷ Dionisio Babo-Soares, *op. cit.*, halaman: 17

⁸ Landry Haryo Subianto dalam Hadi Soesastro (eds), *Peace Building and State Building in East Timor*, Jakarta: CSIS, 2002, halaman 146

Antusiasme terhadap Dewan Nasional ini ditunjukkan melalui berbagai diskusi di media-media selama periode itu, meskipun masyarakat kelas menengah hanya berhati-hati terhadap sikap politik ini. Dewan ini memiliki tujuh komite tetap, yang dapat disamakan dengan kabinet sementara. Dewan ini rencananya akan bekerja hanya sampai periode kampanye menjelang pemilu.

Selain itu, East Timor Transitional Administration (ETTA) atau Administrasi Timor Timur dibentuk pada 7 Agustus 2000 dengan Sergio de Mello tetap sebagai Administrator Eksekutif. Struktur UNTAET tidak dibubarkan dan keberadaannya dalam menteri-menteri kabinet masih dipertahankan (urusan politik dan laut, kebijakan sipil dan pelayanan darurat, pengadilan dan keuangan), tetapi empat jabatan menteri ditambahkan dan diberikan kepada orang-orang Timor Timur (urusan sosial, ekonomi, administrasi internal, dan infrastruktur). Pimpinan inspektur jenderal juga dipegang oleh orang Timor Timur. Sergio de Mello kemudian menetapkan Jose Ramos Horta sebagai Menteri Luar Negeri dari pemerintahan transisi ini.

3.4 Dinamika Politik Dalam Parlemen Sementara Timor Timur

Dewan Nasional yang dibentuk oleh UNTAET bersama-sama dengan orang-orang Timor Timur dalam melaksanakan tugasnya tidak selalu berjalan mulus. Konflik politik juga sering mewarnai hari-hari bekerjanya dewan ini. Konflik yang cukup berarti adalah ketika terjadi beda pendapat mengenai rencana penyusunan Undang-undang Dasar Timor Timur. Setelah beberapa bulan menjadi ketua Dewan Nasional, Xanana diberitakan mengundurkan diri dari kedudukan sebagai ketua Dewan Nasional pada tanggal 29 Maret 2001, setelah perdebatan sengit terjadi dalam pembentukan konstitusi.⁹ Xanana merasa putus asa dengan perbedaan pendapat itu terutama menonjolnya peran dari kelompok-

⁹ *Ibid*, halaman 147

¹⁰ Kompas, 30 Maret 2001

kelompok tertentu. Dikabarkan, Gusmao marah setelah partainya memblokir proposal yang mengakomodasi pandangan 600.000 rakyat Timor Timur. Dalam surat pengunduran dirinya kepada Mello, ia menyebutkan bahwa Dewan Nasional –yang terdiri dari 36 anggota pilihan PBB – tidak mencerminkan pemikiran rakyat negeri itu. Karena itulah, selain mundur dari Ketua Dewan Nasional, ia juga menyatakan tidak akan mencalonkan diri menjadi presiden pertama Timor Timur.

Pamela Sexton dari Forum LSM Timor Timur, di Dili memberikan penjelasan yang lebih rinci.¹¹ Dalam penjelasannya, ia mengatakan bahwa, pengunduran diri Xanana Gusmao keluar dari Dewan Nasional setelah dewan ini menolak dengan perbedaan suara kecil, rancangan undang-undang untuk membentuk komisi yang bertugas melaksanakan konsultasi dengan masyarakat Timor Timur mengenai Undang-undang Dasar baru nanti. Dalam rancangan itu dikatakan bahwa konsultasi itu berlangsung lebih lama dari yang sudah ditetapkan oleh UNTAET. Dalam rancangan undang-undang yang ditolak itu, ditegaskan bahwa komisi persiapan Undang-undang Dasar Timor Timur akan bertugas selama sembilan bulan sedangkan menurut UNTAET hanya tiga bulan. Dengan waktu yang sesingkat itu, menurut Xanana, konsultasi dengan rakyat Timor Timur mengenai Undang-undang Dasar baru di Timor Timur itu tidak akan bisa berlangsung. Padahal Undang-undang Dasar ini sangat penting, dan merupakan langkah terakhir sebelum terbentuknya negara Timor Timur merdeka. Dalam pandangan Xanana, Undang-undang Dasar ini harus benar-benar mencerminkan kehendak rakyat Timor Timur, termasuk kehendak mereka akan sistem demokrasi yang akan dianut oleh Timor Timur. Jadi bukan wawasan sekelompok kecil orang Timor, tetapi masyarakat Timor Timur secara luas. Tanpa konsultasi yang memadai dan

¹¹ Pamela Sexton, *Beda Pendapat Soal UUD Timor Timur Memicu Pengunduran Diri Xanana*, lihat http://www.rnw.nl/ranesi/html/xanana_mundur.html di akses tanggal 18 September 2003.

pantas, sehingga rakyat memahami apa dan bagaimana Undang-undang Dasar Timor Timur, maka maka proses dan hasilnya tidak akan baik.

Bagian politik UNTAET menetapkan batas waktu bahwa dalam 90 hari sudah harus diselenggarakan pemilihan umum untuk memilih Lembaga Konstituante yang menggariskan dan menisahkan Undang-undang Dasar baru tersebut. Xanana menilai PBB tidak belajar dari pengalamannya memegang kendali pemerintah sementara di negara-negara lain. Tetapi kenyataannya Timor Timur memang harus segera melaksanakan pemilihan umum untuk mempersiapkan kemerdekaannya.

Pada tanggal 31 Maret 2001, UNTAET menunjuk Ramos Horta, peraih penghargaan Nobel, untuk menggantikan Xanana Gusmao yang mengundurkan diri dari jabatan Ketua Dewan Nasional.¹² Horta pun setuju dan menerima penunjukkan itu. Namun sebagai formalitas, penunjukan Ramos Horta sebagai Ketua Dewan Nasional masih harus disahkan terlebih dahulu oleh lembaga itu dalam pertemuan tanggal 2 April 2001. menanggapi hal itu, ketua UNTAET, Sergio de Mello mengatakan bahwa dirinya yakin bahwa kemampuan dan energi Horta tak ternilai bagi Dewan Nasional pada bulan-bulan mendatang.

Dalam sidang Dewan tanggal 2 April 2001, terjadi perdebatan sengit. Kalangan Dewan meminta dilakukan kampanye terbuka untuk pemilihan Ketua Dewan Nasional. Mayoritas anggota Dewan itu mengatakan bahwa mereka belum dimintai pertimbangan khusus tentang pengunduran diri Xanana Gusmao dan melakukan pemungutan suara untuk menengguhkan perdebatan tentang pergantian dan kepemimpinannya sampai 9 April 2001. Sementara, Radio Australia ABC melaporkan tanggal 2 April 2001 bahwa sejumlah anggota Dewan juga menuntut agar Dewan yang memiliki 36 anggota itu meminta agar PBB menyusun daftar dari beberapa calon untuk menduduki jabatan ketua

¹² Reuters, *Horta Gantikan Xanana*, ditemukan di <http://www.kompas.com/kompas%2Dcetak/0104/01/ln/hort02.htm> diakses tanggal 21 September 2003

tersebut, daripada hanya menerima otoritas pencalonan Ramos Horta.¹³ Setelah Dewan Nasional menunda sampai sepekan berikutnya (9 April), Dewan memutuskan untuk melakukan voting. Akan tetapi, pada tanggal yang ditetapkan, Horta tidak ada di Dilli sehingga pemungutan suara dilakukan sepekan lagi berikutnya. Demikian Barbara Reis dari otoritas pemerintahan transisi PBB melaporkan kepada *Reuters*.

Sejauh ini, Xanana Gusmao telah dicanangkan sebagai calon utama untuk menduduki jabatan presiden pertama Timor Timur. Namun penolakannya ditengah pertarungan berbagai faksi politik orang Timor Timur itu mengaburkan siapa yang akan menduduki jabatan presiden tersebut. walaupun sebagian orang mengatakan bahwa kini pilihan kandidat presiden ada pada Ramos Horta, tetapi ketika ditanya wartawan apakah sekarang ia menganggap dirinya sebagai calon presiden, Ramos horta hanya tertawa dan mengatakan bahwa dirinya belum punya rencana politik sat ini.

Selama ini, kebanyakan masyarakat Timor Timur, terutama pada tingkat akar rumput, cenderung memberikan dukungan kepada Xanana Gusmao. Sedangkan Ramos Horta –yang mengasingkan diri diluar negeri sejak integrasi Timor Timur ke dalam wilayah Indonesia tahun 1975 dan melobi pemerintahan negara asing untuk mencapai kemerdekaan- tidak begitu dikenal oleh masyarakat.

Meskipun menyatakan mengundurkan diri dari Ketua Dewan Nasional, namun menurut pejabat PBB, Xanana masih tetap aktif berpolitik dan masih menjadi salah satu tokoh kunci Timor Timur menjelang pernyataan kemerdekaan secara resmi akhir tahun ini. Sampai saat ini Xanana masih menjabat ketua CNRT.¹⁴

¹³ Laporan Radio Australia ABC tanggal 2 April 2001, *Dewan Nasional Tunda Pengesahan Horta*, lihat <http://www.kompas.com/kompas%2Dcetak/0104/03/ln?dewa03.htm> diakses tanggal 21 September 2003

¹⁴ *Ibid*

Dalam pencalonannya sebagai Ketua Dewan Nasional, Ramos Horta hanya didukung oleh pihak otoritas PBB, sedangkan semua anggota Dewan lebih memilih Ramos Horta tetap menjadi Menteri Luar Negeri dalam Kabinet Peralihan Timor Timur. Pada tanggal 23 April 2001, dalam sebuah surat yang dialamatkan kepada UNTAET, Ramos Horta menyatakan mundur dari jabatannya di Parlemen Sementara untuk kembali ke jabatan sebelumnya sebagai anggota Kabinet untuk Urusan Luar Negeri. Dewan Nasional memilih Manuel Carrascalao sebagai ketua barunya mengalahkan Ramos Horta.¹⁵

¹⁵ Laporan AP dari Dili, *Ramos Horta Mundur Dari Parlemen*, ditemukan di <http://www.kompas.com/kompas%2Dcetak/0104/24/ln/Ramo04.htm> diakses tanggal 11 Juli 2003



BAB V

KESIMPULAN

Setelah memisahkan diri dari wilayah Indonesia, Timor Timur akan menjadi negara sendiri dan memiliki pemerintahan sendiri. Pemerintahan yang akan mengatur negara kecil ini dan dipilih secara demokratis melalui pemilihan umum. Selama dua tahun mulai lepas dari Indonesia sampai Timor Timur memperoleh proklamasi kemerdekaannya Mei 2002, terdengar terus menerus tentang usaha membangun demokrasi di Timor Timur. Proses demokratisasi ini termasuk pendaftaran ratusan ribu pemilih, pembentukan partai politik, kampanye dan pemilihan umum yang berjalan dengan lancar dan demokratis.

Pemilihan umum kali ini merupakan pemilu yang pertama kali terjadi di Timor Timur. Dalam arti pemilihan umum kali ini merupakan usaha untuk memilih lembaga-lembaga pemerintahan dan pemimpin yang akan memerintah negara ini nantinya untuk pertama kalinya. Pemilihan umum ini juga pemilihan umum pertama yang melibatkan seluruh masyarakat dalam menentukan pilihan-pilihan bersama.

Sebelumnya, bentuk-bentuk pemilihan sudah beberapa kali terjadi di Timor Timur. Setiap bentuk pemilihan di Timor Timur selalu berakhir dengan kekerasan. Perang saudara pernah terjadi pada tahun 1975, sebelum invasi militer oleh Indonesia. Kekerasan itu terjadi diantara kekuatan-kekuatan politik yang bersaing pada saat pembentukan koloni Portugis. Selama berintegrasi dengan Indonesia, rakyat Timor Timur menjadi terbiasa dengan hidup dibawah ketegangan dan kekerasan. Kekerasan yang terakhir kali terjadi juga masih mengingatkan masyarakat Timor Timur ketika negeri ini harus menentukan dua pilihan yang ditawarkan oleh Indonesia, otonomi khusus dibawah pemerintahan Indonesia atau merdeka secara penuh. Jajak pendapat publik yang dilakukan 30 Agustus 1999 itu berakhir dengan kekerasan. Pro integrasi yang merasa kalah dalam pemilihan melakukan pengrusakan dan

pembunuhan secara besar-besaran. Ketiga hal tersebut - perang saudara tahun 1975, ketegangan dibawah pemerintahan Indonesia, dan kekerasan atas hasil dari jajak pendapat tahun 1999 – bisa saja menjadi modal pokok kerusuhan pada pemilihan umum kali ini.

Sampai sekarangpun, kekuatan-kekuatan politik yang berbeda pandangan dan ideologi di Timor Timur masih ada. Tetapi kenyataan yang muncul menyebabkan sejarah Timor Timur berbelok kearah lain. Timor Timur telah menciptakan prestasi yang sangat baik. Pemilihan umum berjalan dengan lancar dan dalam suasana yang demokratis. Berbeda dengan bentuk-bentuk pemilihan yang pernah terjadi sebelumnya.

Pemilihan umum pertama ini merupakan masa yang sangat strategis bagi demokratisasi di Timor Timur. Bagaimanapun demokrasi selalu berlangsung lama. Namun demikian, prasyarat demokrasi seperti keterlibatan masyarakat dalam pemilihan umum, persaingan politik yang cukup terjamin dan rendahnya tingkat kekerasan merupakan indikator penting untuk melihat proses yang terjadi di Timor Timur. Pemilu ini bertujuan untuk membentuk parlemen dan kabinet baru serta kepala pemerintahan yang akan mewakili masyarakat dalam pemerintahan baru serta melaksanakan pemerintahan dengan cara-cara yang telah diatur secara demokratis. Demokratisasi sudah mengarah pada terbentuknya dan disahkannya lembaga-lembaga politik baru dan aturan-aturan politik baru dibawah payung demokrasi.

DAFTAR PUSTAKA

Buku-buku:

- Aditjondro, George Junus, 1998, *FUNU: Perjuangan Timor Lorosae Belum Selesai*, Jakarta: SOLIDAMOR
- Beetham, David dan Kavin Boyle, 2000, *Demokrasi: 80 Tanya Jawab*, Yogyakarta: KANISIUS
- Departemen Penerangan Publik PBB, 2000, *PBB dan Timor Lorosae: Penentuan Nasib Sendiri Melalui Jajak Pendapat*, New York Press
- Gie, The Liang, 1982, *Ilmu Politik*, Yogyakarta: Gajah Mada University Press
- Goodwin-Gill, Guy S., 1999, *Pemilu Jurdil: Pengalaman dan Standar Internasional*, Geneva: Kerjasama Pirac dengan The Asia Foundation
- Hadi, Sutrisno, 1997, *Metodologi Research*, Yogyakarta: Andi Offset
- Hill, Helen Marry, 2000, *Gerakan Pembebasan Timor Lorosae*, Dili: Kerjasama Sahe Institute for Liberation dan Yayasan HAK DILI
- Huntington, Samuel P., 1997, *Gelombang Demokratisasi Ketiga*, Jakarta: Grafiti
- Mas'ood Mohtar, 1994, *Ilmu Hubungan Internasional: Disiplin dan Metodologi*, Jakarta: LP3ES
- Nasution, M. Arif, 2000, *Demokratisasi dan Problematika Otonomi Daerah*, Bandung: Mandar Maju
- O'Donell, Guellermo (Eds), 1993, *Transisi Menuju Demokrasi: Rangkaian Kemungkinan dan Ketidakpastian*, Jakarta: LP3ES
- Soesastro, Hadi (Eds), 2002, *Peace Building and State Building in East Timor*, Jakarta: CSIS
- Plano, Jack C., 1982, *Kamus Analisa Politik*, Jakarta: Rajawali Press
- Suparmoko, 1991, *Metode Penelitian Praktis*, Yogyakarta: Badan Penerbit Fakultas Ekonomi UGM

Suprpto, R., 1997, *Hubungan Internasional: Sistem, Interaksi, dan Perilaku*, Jakarta: Rajawali Press

Urufsky, Melvin I., 2001, *Demokrasi*, US Departement of State: Office of International Information Program

Widjoyo (dkk), 1999, *Indonesia Dalam Transisi Menuju Demokrasi*, Jakarta: LSAF

Dahl, Robert A., 1971, *Polyarchy: Participation and opposition*, New Haven: Yale University Press

Larry Diamond (eds), 1989, *Democracy industri Developing Countries*, Vol:2 Africa, Boulder, Colorado: Lynne Rienne

Koran, Jurnal, dan Majalah

J. Kristiadi, *Dekolonisasi Timor Timur*, Analisis CSIS no.11 Tahun 1986

Bantarto Bandoro, *Dimensi Internasional Masalah Timor Timur*, Analisis CSIS no.11 Tahun 1986

Larry Diamond, *Dewi Fortuna Tak Berpihak Pada Habibie*, Panji Masyarakat 15 September 1999

Timor Timur Di tangan PBB, Kompas 27 Oktober 1999

Xanana Gusmao Serukan Perdamaian, Kompas 9 Juli 2001

Warren caragata, *All agree: Father knows best*, Asiaweek 10 Agustus 2001

A Victory For One, Not Many, Newsweek 17 September 2001

Pernyataan Xanana Tentang Pencalonan Presiden, Suara Timor Lorosa'e 29 Januari 2002

Dimulai, Proses Pemilihan presiden Timor Timur, Kompas 5 Februari 2002

Edy Budiwarso, *Timor Lorosae Di Ufuk Merdeka*, Tempo 24 Maret 2002

Pemilu Di Timor Timur Berlangsung Aman, Kompas 15 April 2002

Situs-situs Internet:

Sejarah Timor Timur Sejak Tahun '1974,
<http://www.solidamor.org/content/sejarah.htm>

Resolusi Dewan Keamanan PBB No. 1272 Tahun 1999,
<http://www.un.org/peace/etimor/docs/9931277E.htm>

Pamela Sexton, Beda Pendapat Soal UUD Timor Timur Memicu Pengunduran Diri Xanana,
http://www.rnw.nl/ranesi/html/xanana_mundur.html

Aboeprijadi Santoso, Fretilin Menjajikan Keamanan dan Keamanan,
http://www.rnw.nl/ranesi/html/janji_fretilin.html

Aboeprijadi Santoso, Fretilin Dipastikan Menang: Tantangan Timor Lorosae Besar,
http://www.rnw.nl/ranesi/html/fretilin_pasti_menang.html

Aboeprijadi Santoso, Fretilin, Pemilu dan Rumput-rumput Lorosae,
http://www.rnw.nl/ranesi/html/rumput_lorosae.html

Horta Gantikan Xanana,
<http://www.kompas.com/kompas%2Dcetak/0104/01/ln/hort02.htm>

Dewan Nasional Tunda Pengesahan Horta,
<http://www.kompas.com/kompas%2Dcetak/0104/03/ln/dewa03.htm>

Ramos Horta Mundur Dari Parlemen,
<http://www.kompas.com/kompas%2Dcetak/0104/24/ln/Ramo04.htm>

Frans Sarong, Fretilin Melejit Sendirian,
<http://www.kompas.com/utama/news/0109/07/163524.htm>

Juveto de Rego, Pencalonan Francisco Xavier Beri Pendidikan Politik Rakyat Timor Lorosae,
<http://www.kompas.com/utama/news/0204/14/163524.htm>

Valens G. Doy, Pemilu di Timor Lorosae,
<http://www.kompas.com/kompas-cetak/0108/30/opini/pemi05.htm>

Julio Thomas Pinto, Fretilin Menang, Rakyat Senang,
<http://www.kompas.com/kompas-cetak/0108/30/opini/fret04.htm>

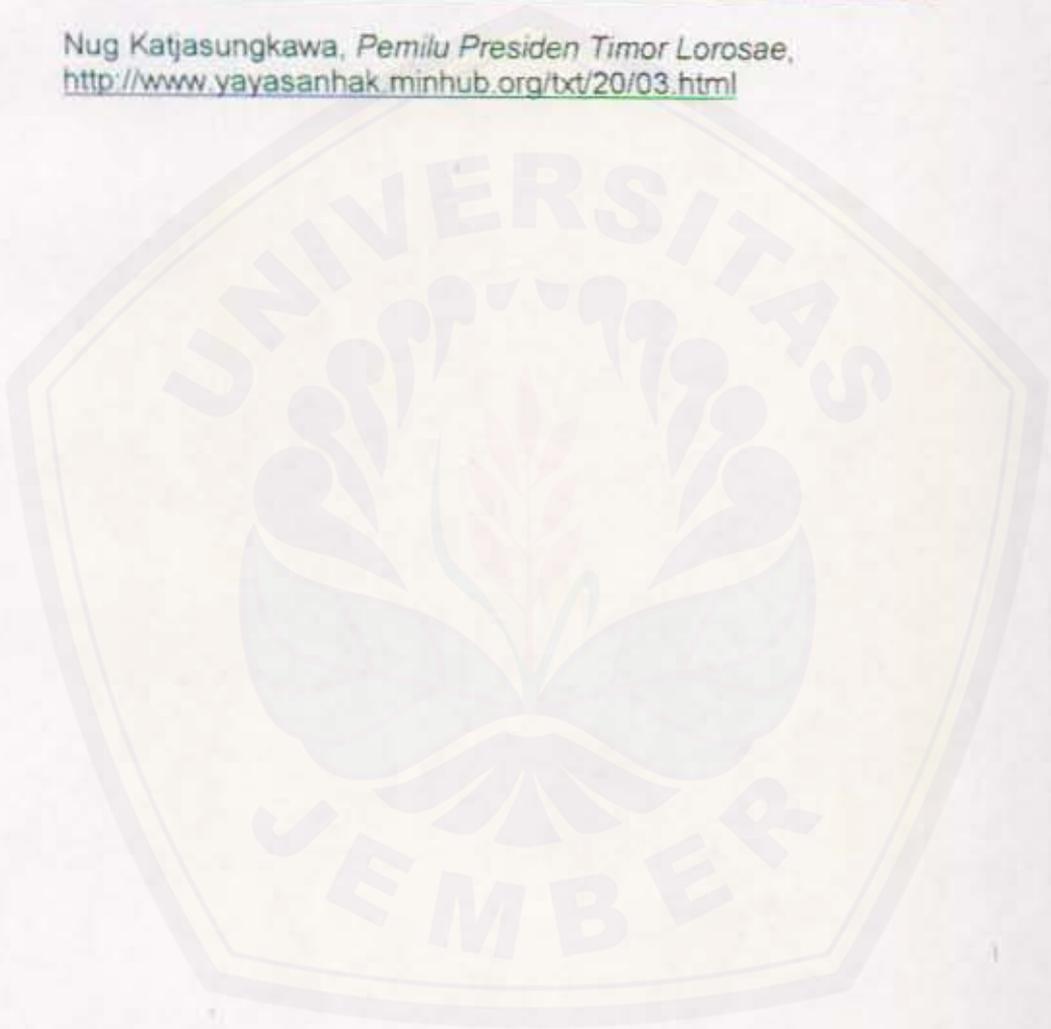
Rien Kuntari, Timor Timur Pilih Presiden,
<http://www.kompas.com/kopas-cetak/0204/14/utama/timt01.htm>

Rien Kuntari, *Xanana Gunakan Sistem Kepresidenan Terbuka*,
<http://www.kompas.com/kompas%2Dcetak/0204/04/18/utama/xana01.htm>

Peraturan Pemilihan Pembentuk Undang-undang (Constituent Assembly),
<http://www.easttimorelection.org/election/2001/docs/acfoa->

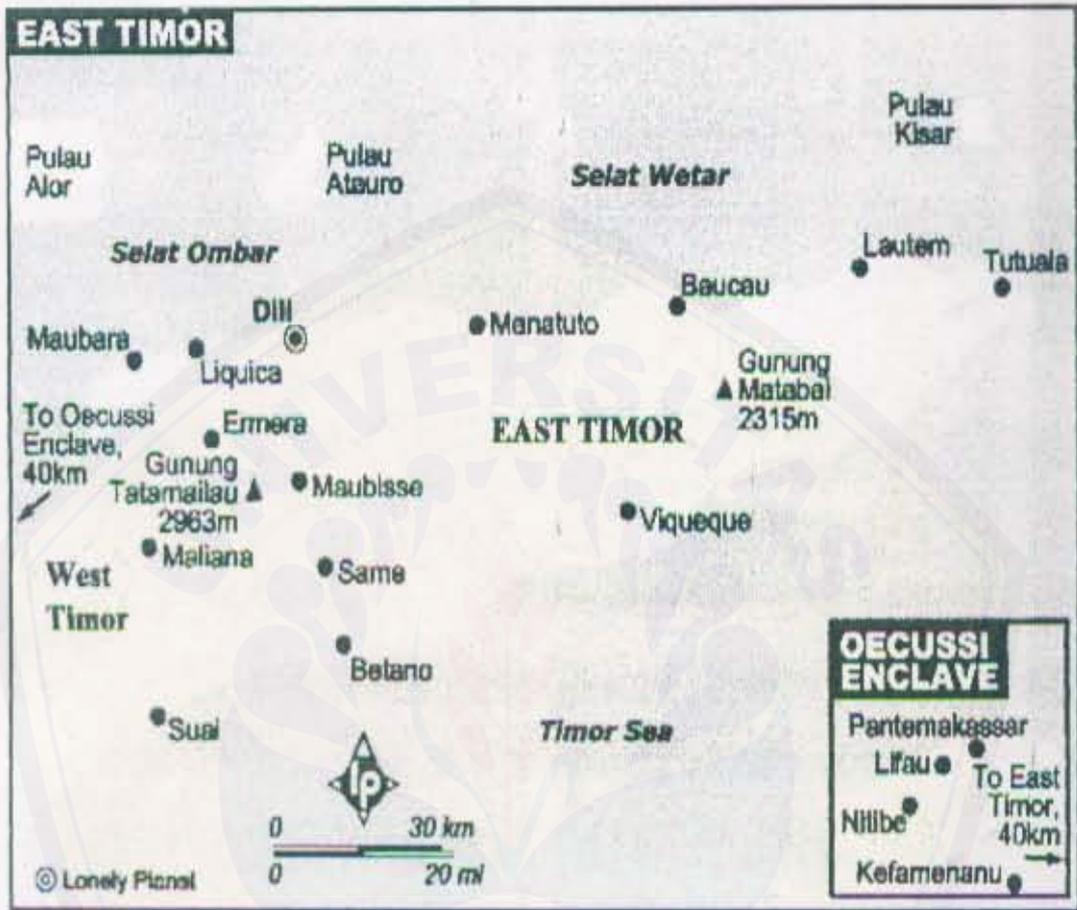
Partai-partai dan Kelompok-kelompok Politik di Timor Timur,
http://www.acfoa.asn.au/advoccy_&_policy/east_timor/partai.pdf

Nug Katjasungkawa, *Pemilu Presiden Timor Lorosae*,
<http://www.yayasanhak.minhub.org/txt/20/03.html>



LAMPIRAN 1

PETA REPUBLIK DEMOKRATIK TIMOR LESTE



Sumber: http://www.lonelyplanet.com/mapshell/south_east_asia/east_timor/east_timor.htm

LAMPIRAN 2

RESOLUSI 1272 (1999)
Disetujui oleh Dewan Keamanan PBB
pada rapat ke 4057 pada tanggal 25 Oktober 1999

Dewan Keamanan.

Mengingat resolusi-resolusi yang dulu dan pernyataan-pernyataan dari Presiden Dewan Keamanan tentang situasi di Timor Timur, khususnya resolusi-resolusi 384 (1975) tertanggal 22 Desember 1975, 389 (1976) tertanggal 22 April 1976, 1236 (1999) tertanggal 7 Mei 1999, 1246 (1999) tertanggal 11 Juni 1999, 1262 (1999) tertanggal 27 Agustus 1999 dan 1264 (1999) tertanggal 15 September 1999,

Mengingat juga Kesepakatan diantara pemerintah Indonesia dan Portugal mengenai soal Timor Timur pada tanggal 5 Mei 1999 dan juga Kesepakatan-kesepakatan diantara Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dan pemerintah Indonesia dan Portugal pada tanggal yang sama tentang prosedur dan persyaratan untuk mengadakan jajak pendapat di Timor Timur berdasarkan suatu pemilihan umum langsung dan perjanjian-perjanjian tentang keamanan (S/1999/513, lampiran I sampai III),

Mengulangi lagi sambutan baik kami atas kesuksesan pelaksanaan jajak pendapat rakyat Timor Timur pada tanggal 30 Agustus 1999, dan memperhatikan hasilnya yang memantulkan dengan jelas keinginan rakyat Timor Timur untuk memulai proses transisi dibawah naungan PBB menuju kemerdekaan. PBB menganggap hasilnya sebagai cerminan yang akurat dari pendapat rakyat Timor Timur,

Menyambut dengan baik keputusan Majelis Permusyawaratan Rakyat Indonesia pada tanggal 19 Oktober 1999 tentang Timor Timur,

Mengutamakan pentingnya rekonsiliasi diantara rakyat Timor Timur,

Menghargai Misi PBB di Timor Timur (UNAMET) atas keberanian dan ketekadan yang terpuji yang ditunjukkan selama pelaksanaan mandatnya,

Menyambut dengan baik penempatan angkatan berbagai-bangsa di Timor Timur berdasarkan Resolusi 1264 (1999), dan mengakui pentingnya diteruskan bekerjasama diantara Pemerintah Indonesia dan angkatan berbagai-bangsa tentang hal ini,

Memperhatikan laporan Sekretaris Jenderal PBB tertanggal 4 Oktober 1999 (S/1999/1024),

Memperhatikan dengan kepuasan hasilnya rapat tiga-pihak yang diadakan pada tanggal 28 September 1999, yang diuraikan dalam laporan Sekretaris Jenderal,

Sangat berprihatinan mengenai situasi perikemanusiaan yang gawat yang menimbulkan karena tindakan kekerasan di Timor Timur dan juga pengungsian skala-besar dan relokasi dari rakyat Timor Timur, termasuk juga jumlah besar perempuan dan anak-anak,

Menegaskan kembali pentingnya agar semua pihak menjamin hak-hak pengungsi dan rakyat yang direlokasi supaya mereka terlindung dan dapat kembali secara sukarela ke rumahnya dalam suasana yang aman dan selamat,

Menegaskan kembali kehormatan kami atas kedaulatan dan integritas territorial Republik Indonesia.

Memperhatikan pentingnya agar keamanan perbatasan-perbatasan wilayah Timor Timur dijamin, dan mengenai hal ini, juga memperhatikan maksud jelas pemerintah Indonesia untuk bekerjasama dengan angkatan berbagai-bangsa yang ditempatkan berdasarkan Resolusi 1264 (1999) dan juga dengan Pemerintahan Transisi PBB di Timor Timur (UNTAET).

Menyatakan keprihatinan tentang laporan-laporan yang menunjukkan bahwa pelanggaran telah dilakukan secara sistematik, tersebar luas dan menyolok atas hukum hak azasi manusia dan hukum perikemanusiaan internasional di wilayah Timor Timur, menegaskan bahwa pelaku-pelaku pelanggaran tersebut harus bertanggungjawab secara pribadi, dan menyeru semua pihak untuk bekerjasama dalam penyelidikan laporan-laporan ini,

Mengingat prinsip-prinsip penting yang dicantumkan dalam Perjanjian Keselamatan Personalia PBB dan Rekannya yang disetujui pada tanggal 9 Desember 1994,

Mempertimbangkan bahwa perkembangan situasi di Timor Timur merupakan ancaman terhadap kedamaian dan keamanan,

Bertindak berdasarkan Bab VII Piagam PBB,

1. Memutuskan untuk mendirikan, sesuai laporan dari Sekretaris Jenderal, Pemerintahan Transisi PBB di Timor Timur (UNTAET), yang diberikan pertanggungjawab penuh atas pemerintahan Timor Timur, dan diberikan kuasa penuh untuk melaksanakan semua urusan legislatif dan eksekutif pemerintah, termasuk urusan administrasi peradilan,
2. Memutuskan juga bahwa mandat UNTAET akan terdiri dari unsur-unsur sebagai berikut:
 - a. Menjamin keamanan dan menegakkan hukum dan ketertiban umum diseluruh wilayah Timor Timur;
 - b. Mendirikan pemerintahan transisi yang efektif,
 - c. Memberi bantuan untuk pembangunan pelayanan sipil dan sosial;
 - d. Menjamin koordinasi dan pengiriman bantuan kemanusiaan, dan bantuan rehabilitasi dan pembangunan;
 - e. Mendukung program perkembangan-kapasitas berpemerintahan sendiri,
 - f. Membantu mengembangkan kondisi-kondisi untuk kelangsungan pembangunan;
3. Selanjutnya memutuskan bahwa UNTAET akan mempunyai tujuan-tujuan dan struktur seperti diuraikan di bagian IV dari laporan Sekretaris Jenderal, khususnya, bahwa komponen-komponen pokoknya akan terdiri dari:
 - a. Komponen pemerintahan dan administrasi umum, termasuk angkatan polisi internasional sejumlah 1,640 anggota polisi;
 - b. Komponen bantuan kemanusiaan dan rehabilitasi darurat;
 - c. Komponen military, terdiri dari angkatan 8,950 prajurit dan sampai 200 pengamat militer;
4. Memberikan kuasa kepada UNTAET untuk mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk memenuhi mandatnya;

5. Mengakui bahwa, dalam pengembangan dan pelaksanaan fungsi sesuai dengan mandatnya, UNTAET akan perlu meminta bantuan keahlian dan kapasitas Anggota Negara, lembaga-lembaga PBB dan organisasi-organisasi internasional yang lainnya, termasuk juga lembaga-lembaga keuangan internasional.
6. Menyambut dengan baik maksud Sekretaris Jenderal menunjukkan seorang Wakil Khusus, yang sebagai Administrator Pemerintahan Transisi, akan bertanggungjawab atas segala aspek misi PBB di Timor Timur dan akan berkuasa mengeluarkan undang-undang dan peraturan-peraturan yang baru dan juga merubah, membatalkan sementara or membatalkan undang dan peraturan yang ada.
7. Mengutamakan pentingnya bekerjasama diantara pemerintah Indonesia, Portugal dan UNTAET untuk melaksanakan resolusi ini.
8. Mengutamakan keperluannya agar UNTAET berkonsultasi dan bekerjasama secara rutin dengan rakyat Timor Timur dalam pelaksanaan mandatnya secara efektif dengan pandangan untuk mengembangkan lembaga-lembaga local yang demokratis, termasuk lembaga hak azasi manusia Timor Timur yang independen, dan akhirnya peralihan fungsi-fungsi pelayanan pemerintahan dan administrasi umum kepada lembaga-lembaga tersebut.
9. Meminta agar UNTAET dan angkatan berbagai-bangsa yang ditempatkan berdasarkan Resolusi 1264 (1999) bekerjasama secara rutin satu sama yang lainnya, dengan pandangan juga untuk menggantikan secepatnya angkatan berbagai-bangsa dengan komponen militer UNTAET, seperti telah diberitahukan oleh Sekretaris Jenderal sesudah berkonsultasi dengan pemimpin angkatan berbagai-bangsa, dengan mempertimbangkan kondisi-kondisi di lapangan.
10. Mengulangi lagi keperluan mendadak untuk mengkoordinasikan bantuan kemanusiaan dan rekonstruksi, dan menyeru semua pihak agar bekerjasama baik dengan organisasi kemanusiaan dan hak azasi manusia untuk menjamin keselamatan mereka, perlindungan rakyat umum, khususnya anak-anak, dan juga pulang kembalinya pengungsi dan orang yang direlokasi dengan aman dan juga menjamin bahwa bantuan kemanusiaan dapat disampaikan dengan efektif.
11. Menyambut dengan baik komitmen pemerintah Indonesia untuk membiarkan pengungsi dan orang yang direlokasi di Timor Barat dan tempat-tempat lain di wilayah Indonesia untuk memilih apakah mereka ingin kembali ke wilayah Timor Timur, tetap tinggal di lokasi sekarang atau direlokasi ke tempat lain di Indonesia, dan mengutamakan pentingnya agar pemerintah Indonesia dapat menjamin bahwa organisasi-organisasi kemanusiaan dapat akses penuh, aman dan tanpa hambatan untuk melaksanakan tugasnya.
12. Mengutamakan bahwa adalah pertanggungjawab pemerintah Indonesia untuk mengambil langkah langsung dan efektif supaya menjamin pulang kembalinya pengungsi di Timor Barat dan di tempat-tempat lain di wilayah Indonesia ke wilayah Timor Timur, keamanan para pengungsi dan suasana sipil dan kemanusiaan kamp-kamp pengungsi dan tempat kediamannya, khususnya mengurangi kegiatan intimidasi dan kekerasan para milisi di daerah tersebut.
13. Menyambut dengan baik rencana Sekretaris Jenderal untuk mendirikan suatu Dana Perwalian (*Trust Fund*) yang disediakan untuk, diantara lainnya, rehabilitasi sarana / prasarana pokok, termasuk juga pembangunan lembaga-lembaga penting, operasi pelayanan dan keperluan umum dan pembayaran gaji pegawai sipil.

14. Menganjurkan Anggota-anggota Negara dan lembaga dan organisasi internasional untuk menyediakan personalia, peralatan and sumber-sumber lainnya untuk UNTAET sesuai dengan permintaan Sekretaris Jenderal, termasuk keperluan untuk membangun lembaga-lembaga dan kapasitas dasar, dan mengutamakan bahwa usaha-usaha tersebut perlu dikoordinasi secara tuntas;
15. Mengutamakan pentingnya untuk merekrut personalia untuk UNTAET yang memiliki pengalaman tentang soal kemanusiaan internasional, hak azasi manusia dan hukum-hukum pengungsi, termasuk ketentuan-ketentuan mengenai anak-anak dan hal berhubungan dengan jenis kelamin, dan juga berbakat soal negosiasi dan komunikasi, kesadaran budaya dan yang berpengalaman soal koordinasi diantara program sipil-militer;
16. Mengutuk segala kekerasan dan tindakan yang mendukung kekerasan di wilayah Timor Timur, menyeru supaya tindakan tersebut mengakhir secepatnya, dan menuntut agar pelaku-pelaku yang bertanggungjawab atas tindakan kekerasan dibawa ke peradilan;
17. Memutuskan untuk mendirikan UNTAET untuk periode awal sampai tanggal 31 Januari 2001;
18. Meminta Sekretaris Jenderal melapor secara rutin dan lengkap kepada Dewan Keamanan mengenai kemajuan dalam pelaksanaan resolusi ini, termasuk, khususnya, mengenai penempatan personalia UNTAET dan kemungkinan pengurangan komponen militer dikemudian hari jika situasi di Timor Timur telah membaik, dan untuk menyampaikan laporan pertama dalam waktu tiga bulan sejak tanggal pengeluanan resolusi ini dan sesudah itu untuk menyampaikan laporan setiap enam bulan;
19. Memutuskan untuk tetap memperhatikan persoalan ini secara aktif.

Unofficial translation

Sumber: <http://www.un.org/peace/etimor/docs/rs1272-b.htm>

LAMPIRAN 3

The Sixteen Political Parties

Following is a list of the sixteen Political Parties registered for the election of the 2001 Constituent Assembly.

Names, Leaderships and Candidates	Historical Accounts	Programs
1. Apodeti Pro. Referendum [Associação Popular Democrática de Timor Pro Referendo] [Popular Democratic Association of Timor Pro Referendum]		
Established in 1974. Party President : Frederico Almeida Santos da Costa. 15 Candidates, 1 District Candidate.	This is one of the Historical Parties of East Timor. In 1974 APODETI advocated for the integration into the Republic of Indonesia but it made public declaration at the CNRT congress of August 2000 accepting the result of the	Some points of the Party's program include : - Timorisation of the current administration - Dialogue and reconciliation - Free market economy - Universal Education, Free as far as possible
	Popular Consultation of 30 August 1999 referendum, thus adding « Pro Referendum » to the party's name.	- Universal Health System, Free as possible - Privilege diplomatic relations with Indonesia and Australia and with Lusophone countries - Support programs for war victims and those deprived of opportunities due to their clandestine activities - Provisional use of Portuguese as the official language while Tetum is being developed.
2. ASDT [Associação Social-Democrata Timorese]		
Established April 2001. Party President : Francisco Xavier do Amaral. 73 National Candidates, 3 District Candidates	Although proclaimed on April 2001 by FRETILIN first President, Francisco Xavier do Amaral, the Party takes its name from the Association that gave birth to Fretilin in 1974. As described in John G. Taylor book ⁹ , in 1974 it « comprised mostly of the newly recruited members of the urban elites, most of ASDT founders lived in Dili, although they retained ties with their rural areas of origin, and several of them were from liurai families [...] ASDT was social democratic, with the emphasis on democratic. It was formed to defend the idea of independence ».	In 2001, Xavier do Amaral would like to see a restoration of the 1975 RDTL government ¹⁰ . The Party registered its own flag with the IEC, following plans to compete with Fretilin for their flag.

<p align="center">3. Fretilin [Frente Revolucionária de Timor Leste Independente] [Revolutionary Front of Independent East Timor]</p>		
<p>Established September 1974. Party President : Francisco Guterres (Lu Olo). 75 National Candidates, 12 District Candidates.</p>	<p>This is one of the historical parties of East Timor. Fretilin was born out of ASDT, in September 1974, when « radical - Maoist-influenced - East Timorese students started returning to Dili from Lisbon and the ASDT party took a sharp turn to the left changing its name into Fretilin and embarking on a revolutionary social and economic reform programme [...] which owes much to the example of the successful liberation movements in Africa...»¹¹. Most of the well known names of East Timor nationalism, such as Nicolau Lobato (†), Xanana Gusmão, José Ramos Horta, Mari Alkatiri, Nino Konis</p>	<p>Fretilin is, as its name expresses, a liberation movement. In order to turn it into a clear political formation, the movement held two major conferences to forge a program of action and to define itself as a Political Party for the 2001 elections. In August 1998, the Party held a major conference in Sydney where it defined a program of principles and a political manual on common Fretilin expressions and symbols. In May 2000, it held a national conference in Dili attended by the delegates of all 13 districts of East Timor to prepare for the 2001 elections. Fretilin's program includes : - Support of Democracy,</p>
	<p>Santana (†) to name a few, have been or still are Fretilin members. The history of Fretilin is still to be written. From the earliest times and as a nationalist movement, it opted in 1974 for a strong, indigenous component in the idea of nation-building and « rather than attempting to incorporate aspects of East Timorese culture, politics and society within the framework of Portuguese metropolitan culture, it directed its policies toward what it regarded as important areas of indigenous society, taking them as the basis for its organization strategies »¹².</p>	<p>Pluralism, Culture of dialogue, Tolerance and Peace - Establishment of a Commission on Tolerance and Unity to investigate Fretilin errors in the last two decades - Support to East Timor application as member of the United Nations - Support for joining the CPLP (Community of Portuguese Speaking Countries), Asean, South Pacific Forum - Development of a trilateral cooperation between East Timor, Australia and Indonesia</p>
<p align="center">4. Kota [Klibur Oan Timor Asuawin] [Sons of the Mountain Warriors or Association of Timorese Heroes]</p>		
<p>Established in 1974. Party President : Leão Pedro dos Reis Amaral. 75 National Candidates, 8 District Candidates.</p>	<p>Kota has been described as an incipient party¹³ when it was formed in November 1974 by Leão Amaral and José Martins (†). It was previously known as the Popular Association of Monarchists of East Timor and was composed of several Liurais¹⁴.</p>	<p>Kota was reorganised in 2000 and, although it is oriented towards a strong power of the Liurais, it denies supporting the establishment of a Monarchic System and as expressed support to a multi-party system. It advocates that economical policies should be used to eradicate poverty, namely through the development of agriculture, fishing, tourism and coffee production. The teaching of Portuguese, Indonesian and English</p>

		should be implemented in schools, it also favours the establishment of a commission for the development of Tetum language.
5. Parentil [Partido Republika Nacional de Timor Leste] [National Republican Party of East Timor]		
Established in February 2001. Party President : Flaviano Pereira Lopez. 52 National Candidates, no District Candidates.	Parentil is composed of young East Timorese and was established in February 2001.	The Party is set up with the aim of counterbalancing the influence of the older generation of political leaders. It was one of the two parties that refused to sign the Pact of National Unity ¹⁵ .

.../...

6. PD [Partido Democrático] [Democratic Party]		
Established June 2001. Party President : Fernando de Araújo. 73 National Candidates, 12 District Candidates.	This very young party includes most of the members of the youth resistance organisation Renetil, although Renetil remains an independent NGO and is not affiliated in the party.	
7.PDC [Partido Democrata Cristão] [Christian Democratic Party]		
Established August 2000. Party President : António Ximenes. 73 National Candidates, 1 District Candidate.	This is one of the two Christian Parties of East Timor. Although both PDC and UDC/PDC [see below] based on Christian social justice values, PDC is said to be seen more as a leftist party with some sympathy to Fretilin. It appears to be a mix of both Protestant and Catholic in its leadership.	
8. PDM [Partai Demokratik Maubere] [Maubere Democratic Party]		
Established October 2000. Party President : Paulo Sarmiento Pinto.	PDM is said to be a minor party using the terminology of Maubere, a term popularised in the 70s by Fretilin to appeal to the idea of the rural poor and subsequently to appeal to nationalist sentiment.	
9. PL [Partai Liberal] [Liberal Party]		
Established May 2001. Party President : Armando da Silva.	A minor party established appealing mostly to the younger generation who were active on	

32 National candidates, 5 District Candidates.	the resistance against Indonesia.	
10. PNI [Partido Nasionalista Timorese] [National Party of Timor]		
<p>Established in 1999. Party Acting President : Aliança Araujo. 48 National Candidates, no District Candidate.</p>	<p>PNT is headed by Abilio de Araujo, a former Fretilin member and representative in Lisbon who was expelled due to his pro-Indonesian positions. He was Minister for Economic and Social Affairs in the 1975 RDTL government and he is seen as a very controversial figure due to his alliance with the Subarto family. PNT was established in 1999 before the referendum ballot to promote an alternative to CNRT.</p>	<p>PNT was the second party that refused to sign the Pact of National Unity.</p>

.../...

11. PPT [Partido do Povo de Timor] [Peoples Party of Timor]		
<p>Established in November 2000. Party President : Jacob Xavier. 71 National Candidates, 9 District Candidates.</p>	<p>The President, Jacob Xavier, claims he is the direct descendant of the King of Portugal. The party has some support among traditional chiefs (lurai) particularly in the Districts of Manufahi and Ainaro.</p>	
12. PSD [Partido Social Democrata] [Social Democratic Party]		
<p>Established September 2000. Party President : Mário Viegas Carrascalão. 74 National Candidates, 11 District Candidates.</p>	<p>When PSD was established on 20th September 2000 at CNRT headquarters it counted with the participation of Xanana Gusmão as a guest speaker. Mário Carrascalão was former Indonesian Governor of East Timor between 1982-1992. In our western political terminology, the Party could be defined as a right wing party. Many former UDT and Fretilin members have joined PSD. Although Xanana Gusmão and José Ramos Horta have denied support to the new party, it is said that they are both in favour of it.</p>	<p>The Party program supports multi-party system defending the role of government in economic management. Priority is given to Education, Culture, Health, Housing and good governance. The party opposes the Death Penalty and Abortion. In Foreign Policy it supports the membership within the Asean and CPLP. It also supports the use of Portuguese as national language with a strong development of Tetum.</p>

13. PST [Partido Socialista de Timor] [Socialist Party of Timor]		
Established in 1991. Party President : Pedro dos Mártires da Costa. 75 National Candidates, 2 District Candidates.	Founded in the 1990's, it has a pronounced Marxist-Leninist ideology. It merged out of students and labour groups based in Jakarta and other Indonesian cities where East Timorese students were active. It has branches in many Districts while focussing its activities on traditional Fretilin areas, such as Liquica, Los Palos, Aileu and Díli. It has established a number of cooperative farms of coffee production.	The party supports the multi-party system. It advocates a universal, free and compulsory education. It pledges the adoption of Portuguese and English as official languages during a transition period while Tetum is being developed. It advocates the rights of workers including free trade unions. It has an extended social program based on the right to housing, a free and universal health system and equal distribution of arable land and expropriation of large landholdings. It is against the death penalty.
14. PTT [Partido trabalhista timorense] [Timor Workers Party]		
Established in 1974. Party President : Paulo Freitas da Silva. 33 National Candidates, 5 District Candidates.	When launched in 1974, the PPT saw itself as an alternative to a communist Fretilin but was considered a minor party at that time. The party signed the 1975 Declaration for	The party has quire a significant social program with the emphasis on social justice and equal rights of opportunities for women. It is very much committed to human
	Integration in Indonesia and Paulo Freitas represented Megawati Soekarnoputri PDI at the Provincial Level Parliament during the Indonesian inter-regna.	rights and issues such as child labour.
15. UDC/PDC [Partido Democrata Cristão de Timor] [Christian Democratic Party]		
Established in 1998. Party President : Vincente da Silva Guterres. 74 National Candidates, 3 District Candidates.	UDC/PDC was launched in March 1998 in Lisbon. It is based on a Christian humanism and on the social doctrine of the Church.	It favours a market economy. The party promotes the idea of basic education and health services as free and universal and stands for the promotion of local dialects and languages as East Timor heritage.
16. UDT [União Democrática Timorense] [Timorese Democratic Union]		
Established in 1974. Party President : João Viegas Carrascalão. 71 National Candidates, 9 District Candidates.	UDT was the first Political Party to be established. In 1974 - What was initially the most popular party titled itself the Timorese Democratic Union (UDT). Its programme called for democratisation, income redistribution, human rights, but above all, for self-determination for the Timorese people oriented	UDT's program includes : - Presidential system - A centralised system of government - Role for the elder to solve village level problems according to customary law - Pensions for ex-Portuguese and Indonesian Public Servants - Pensions for retired Falintil

	<p>towards a federation with Portugal [...]. The union's organizing members illustrated its leadership. Its President, Mario Carrascalão was a forestry engineer and a coffee-plantation owner »16. In a national congress held in 1997, UDT Statutes were revised and updated. However the Party lost some of its supporters to the PSD when it was established.</p>	<p>members and their widows and orphans</p>
<p style="text-align: center;">National Independent Candidates :</p> <ul style="list-style-type: none">- Domingos Alves- Daniel da Silva Ramalho- Teresa Maria de Carvalho- Olandina Caeiro- Maria Domingas Fernandes		
<p style="text-align: center;">District Independent Candidates</p> <p>Lautem : Justino Valentim, Carolino da Silva, Aurelio Freitas Ribeiro, Agapito Ramos Manatuto : Manuel Cárceres da Costa Dili : Marcolino Ribeiro Afonso Oecussi : Apolónia de Fátima da Costa, António da Costa Lelan, Etelvina da Costa Ermera : Eduardo de Deus Barreto Bobonaro : Domingos dos Santos</p>		

Sumber: <http://216.239.33.100/search?q=cache:sBA-TW6HxJgC:www.cean.u-bordeaux.fr/lusotopie/desousa.rtf+UNTAET+role+in+east+timor+election&hl=en&ie=UTF-8>



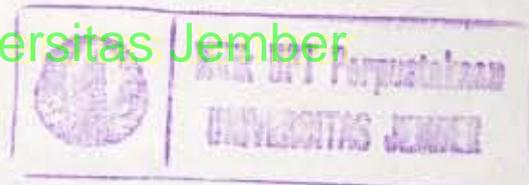
LAMPIRAN 4

Tabel. I. -- Electoral Results National Representative Election

Party or Candidate	Total Votes	Votes as a % of Total Valid Votes	Seats
Total Valid Votes	363 501	100.00 %	
Total Valid Vote Casts (% of Total Casts)	363 501	94.60 %	
Invalid Votes	20 747	5.40 %	
Total Votes Casts	384 248	100.00 %	
Total Seats			75
Fretilin	208 531	57.37 %	43
PD	31 680	8.72 %	7
PSD	29 726	8.18 %	6
ASDT	28 495	7.84 %	6
UDT	8 581	2.36 %	2
PNT	8 035	2.21 %	2
Kota	7 735	2.13 %	2
PPI	7 322	2.01 %	2
PDC	7 181	1.98 %	2
PST	6 483	1.78 %	1
PL	4 013	1.10 %	1
UDC/PDC	2 413	0.66 %	1
Apodeti Pro Ref.	2 181	0.60 %	0
PTT	2 026	0.56 %	0
PDM	1 788	0.49 %	0
Domingos Alves	1 492	0.41 %	0
Daniel da Silva	1 412	0.39 %	0
María Domingas Fernandes	947	0.26 %	0
Olinda Caeiro	779	0.21 %	0
Teresa Maria de Carvalho	711	0.20 %	0

Tabel. II. -- National Representative Election Result in the District of Dili

Party	Votes as a % of Total Valid Votes
Fretilm	66.05
ASDT	10.53
PSD	4.76
PD	5.88
UDT	2.30
Others	10.28



Tabel. III. -- Party Elected District Representatives

District	Party	Total Votes Received	% of Valid Votes Received
Aileu	Fretilin	5 118	57.47 %
Ainaro	Fretilin	6 050	34.63 %
Bacau	Fretilin	38 525	85.97 %
Bobonaro	Fretilin	18 743	60.34 %
Covalima	Fretilin	13 961	65.74 %
Dili	Fretilin	47 855	72.49 %
Ermera	Fretilin	14 724	39.79 %
Lautem	Fretilin	12 766	54.93 %
Liquiça	Fretilin	16 247	78.43 %
Manatuto	Fretilin	8 501	55.04 %
Manufahi	Fretilin	10 235	75.12 %
Oecussi	Independent	8 207	36.06 %
Viqueque	Fretilin	22 721	81.62 %

Tabel. IV. -- Fretilin Results in the National Representation Vote per District as % of Valid Votes

Aileu	21,15%
Ainaro	27,56%
Baucau	81,98%
Bobonaro	57,42%
Cova Lima	61,42%
Dili	66,05%
Ermera	31,94%
Lautem	62,76%
Liquiça	72,44%
Manatuto	47,57%
Manufahi	54,56%
Oecussi	38,60%
Viqueque	74,95%

Sumber: <http://216.239.33.100/search?q=cache:sBA-TW6HxJgC:www.cean.u-bordeaux.fr/lusotopie/desousa.rtf+UNTAET+role+in+east+timor+election&hl=en&ie=UTF-8>